43460.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

KINERJA APARTUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH)

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

AZHARI

NIM. 501482852

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup
(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah)
adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Takengon, Juni 2018
menyatakan

Azhari
Nim. 501482852

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ABSTRACT

PERFORMANCE OF CIVIL STATE APPARATUS IN THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MAINTENANCE PROGRAM (STUDY ON LIVING ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT DISTRICT OF CENTRAL ACEH DISTRICT)

Azhari
azharidsi@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia open University

This research seeks to explore several issues related to the performance of the state civil apparatus in the implementation of the environmental maintenance program at the Living Environment Department of Central Aceh District and the factors that influence it. This research is descriptive research with quantitative and qualitative method to get and deliver facts clearly and accurately. Based on the result of research known that; first, the performance of the state civil apparatus at the Living Environment Department of Central Aceh District is not yet optimal. This can be seen from several aspects, namely the level of consistency of policies and activities of the service has not been in accordance with the demands of society, the high level of business violations, and still the public complaints about licensing services. Second, as for the cause factor can be seen from three things, that is organization structure that have not accommodate all activities that must be implemented so that influence on delegation of authority, still lack of human resources, both from quantity and quality, and budget available not yet enough to carry out activity which is already planned.

Keywords: Performance, State Civil Apparatus, Environmental

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

ABSTRAK

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH)

Azhari
azharidsi@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini berupaya mendalami beberapa persoalan terkait dengan kinerja aparatur sipil negara dalam pelaksanaan program pemeliharaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta dengan jelas dan teliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; *pertama*, kinerja aparatur sipil negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas belum sesuai dengan tuntutan masyarakat, masih tingginya tingkat pelanggaran pengusaha, dan masih adanya keluhan masyarakat tentang pelayanan perizinan. *Kedua*, adapun faktor penyebabnya dapat dilihat dari tiga hal, yaitu struktur organisasi yang ada belum menampung seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga berpengaruh pada pendelegasian wewenang, masih kurangnya sumber daya manusia, baik dari kuantitas maupun kualitas, dan anggaran yang tersedia belum memadai untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

Kata Kunci: *Aparatur Sipil Negara, Pemeliharaan Lingkungan Hidup*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah)
Penyusun TAPM	:	Azhari
NIM	:	501482852
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Minggu / 22 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing II	Pembimbing I,
Dr. UCU RAHAYU, M.Sc	**Dr. MUZAKKAR A.GANI, SH, M.Si**

Penguji Ahli

Prof. DR. MARTANI HUSEINI, MSi

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik	**Dekan FHISIP**
Dr. DARMANTO, M. Ed	**Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D**
NIP. 19591027 198603 1 003	NIP. 19640722 198903 1 019

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	Azhari
NIM	:	501482852
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM	:	Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	:	Minggu / 22 Juli 2018
W a k t u	:	16.00 – 17.00

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji	**Tanda Tangan**
DR. Lula Nadia, MA, MSi	.....
Penguji Ahli	
Prof. DR. Martani Huseini, MSi	.....
Pembimbing I	
Dr. MUZAKKAR A.GANI, SH, M.Si	.....
Pembimbing II	
Dr. UCU RAHAYU, M.Sc	.....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Puji da syukur kehadirat Allah SWT, pemberi rahmat dan hidayah sumber karunia dan berkah, atas kehendak dan izinnya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) berjudul : Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah) dapat diselesaikan Salawat dan salam atas Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah pembawa Risalah dengan penuh petunjuk dan Aklaq mulia.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik pada Universitas Terbuka. Sejakdari awal sampai akhir penulis banyak menemui kesulitan terutama sekali dalam mencari bahan-ahan yang berhubungan dengan penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini, penulis menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan Pendidikan yang penulis peroleh sangat minim sehinga penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini jauh dari kesempurnaan.

Dalam Penyelesaian Tugas Akhir Program Magister ini penulis menerima masukan dari berbagi pihak, baik moril maupun materil. Atas bantuan tersebut penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Pertama sekali ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak. Dr. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si, sebagai pembimbing

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

pertama dan kepada ibu Dr. Ucu Rahayu, M.Sc. sebagai pembimbing kedua.

2. terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh karyawan/ Dosen Universitas Terbuka yang telah menempa Penulis sejak Semester I sampai Sekarang ini, dan ucapan terima kasih kepada instansi terkait yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
3. Dari Lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Alm. Abdul Rahman dan Ibunda Sepiah, dan kepada Mertua Ayahanda Mustafa dan Ibunda Kamariah mereka telah berjasa penuh yang tak akan terlupakan, demikian juga kepada sanak keluarga serta segenap ahli Famili.
4. Terima Kasih buat istri tercinta Juraini yang selalu memeberi doa dan dukungan, memberikan inspirasi, motivasi, juga anak-anak terkasih, Rinu Budiara, Arani Rizkia, Habib Maulana, Arsy Fajura.
5. Ucapan terima kasih khusus kepada Bapak Dr. Edi Putra Kelana, S.IP. yang telah memberikan banyak ilmu dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister ini.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang telah bersedia memberikan data dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Terima kasih yang sehesar-besarnya kepada seluruh teman-teman staf dan pegawai seinstansi yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister ini khususnya, kepada Dr.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Johansyah, MA, Rizkan, S.Ag, Indra Budiman dan Cici Putri Utama Manurung, SE.

8. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan, seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, penulis menyampaikan penghargaan atas dorongan dan semangat untuk terus belajar, bekerja dan berprestasi.

Atas Bimbingan, Bantuan, serta Dorongan dari semua Pihak, mudah-mudahan segala bantuan yang sudah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini masih jauh dari kesempurnaan, sehubungan dengan itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang sangat berharga dari semua kalangan untuk kesempurnaan Tugas Akhir Program Magister ini.

Akhirnya penulis berharap semoga hendaknya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini bermanfaat kepada penulis khususnya dan kepada kita pada umumnya.

Takeugon, Mei 2018
Penulis,

Azhari
Nim. 501482852

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Azhari
NIM	:	501482852
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir	:	Aceh Tengah / 10 Oktober 1971
Riwayat Pendidikan	:	- Lulus Min Kenawat pada Tahun 1984 - Lulus SMPN Lentik pada Tahun 1987 - Lulus SMA Darussa'adah di Sigli pada Tahun 1990 - Lulus S1 IAIN –Ar-Raniry di Banda Aceh Tahun 1996
Riwayat Pekerjaan	:	- Tahun 2001 s/d 2003 sebagai bendahara Barang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah - Tahun 2003 s/d 2007 sebagai bendahara Pengeluaran pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah - Tahun 2008 s/d 2010 sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah - Tahun 2010 s/d sekarang sebagai Kasi Penataan Sarana Perbibadatan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.

Takengon, Mei 2018
Penulis,

Azhari
Nim. 501482852

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

DAFTAR ISI

		Hal
Abstrac		i
Abstrak		ii
Lembar Persetujuan		iii
Lembar Pengesahan		iv
Pernyataan		v
Kata Pengantar		vi
Riwayat Hidup		ix
Daftar Isi		x
Daftar Bagan		xii
Daftar Gambar		xiii
Daftar Tabel		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	10
	C. Tujuan penelitian	10
	D. Kegunaan penelitian	10
BAB II	Tinjauan Pustaka	
	A. Kajian Teori	12
	B. Penelitian Terdahulu	42
	C. Kerangka Berpikir	47
	D. Operasional Konsep	48
BAB III	Metode Penelitian	
	A. Desain Penelitian	52
	B. Populasi dan Sample	52
	C. Prosedur Pengumpulan Data	53
	D. Metode Analisa Data	55
BAB IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	
	A. Deskripsi Objek Penelitian	57
	1. Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	57
	2. Visi dan Misi Organisasi	62
	3. Unsur Organisasi	66
	4. Keadaan Pegawai	80
	5. Keadaan Keuangan / Finansial	82
	6. Keadaan Sarana Kerja	85
	B. Hasil Penelitian	87
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

Kabupaten Aceh Tengah..... 88
1. Akuntabilitas 88
2. Responsibilitas 104
3. Responsivitas 115

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 121
1. Struktur Organisasi 122
2. Sumber Daya Manusia 128
3. Finansial 134

C. Keterkaitan antara Variabel Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Finansial dengan Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 138

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 143
B. Saran-saran 144
Daftar Pustaka 146
Lampiran :
Daftar Panduan Wawancara 150

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah..... 56

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 45

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Menurut Tingkat Pendidikan 77

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Menurut Golongan 78

Tabel 2.3 Sarana Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 83

Tabel 2.4 Realisasi Pelaksanaan Diklat yang diikuti oleh Pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 93

Tabel 2.5 Rencana dan Realisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 98

Tabel 2.6 Ketaatan Pengusaha/Penambang terhadap Aturan Tahun 2017 104

Tabel 2.7 Perbandingan Penerimaan Retribusi/Pajak dari Pertambangan Bahan Galian C terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 / 2013 - 2017.....106

Tabel 2.8 Kontribusi Penerimaan dari Pajak ABT terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah.....107

Tabel 2.9 Daftar Raperda/SK Bupati.....110

Tabel 2.10 Rencana dan Realisasi Kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.....117

Tabel 2.11 Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 128

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara 98

Lampiran 2 Transkrip wawancara 100

Lampiran 3 Struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 102

Lampiran 4 Dokumentasi penelitian 103

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah. Kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional.

Untuk tujuan itu banyak yang harus kita lakukan, salah satunya adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab fiskal, politik dan administrasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Di Indonesia lingkungan legal dan regulasi pokok untuk desentralisasi terangkum dalam tiga undang-undang yaitu UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketiga undang-undang tersebut tidak berdiri sendiri secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan daerah otonom yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif secara berkesinambungan. Pada era reformasi sekarang ini, dengan telah dikeluarkannya Undang-undang tadi sangat penting artinya dalam kehidupan sistem ketatanegaraan khususnya sistem pemerintahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah karena akan membawa perubahan yang mendasar pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pengukuran kinerja terhadap suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah banyaknya keluhan dari para pengguna jasa yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik adalah sumber kelambanan, pungli dan in-efisiensi (Dwiyanto, 2012). Lebih lanjut Dwiyanto menjelaskan bahwa citra organisasi publik di negara berkembang, termasuk Indonesia dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya amat buruk jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Karenanya tidaklah mengherankan kalau organisasi swasta seringkali dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbicara masalah kinerja organisasi publik, terlebih setelah diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah secara aktif, meningkatkan peran dan fungsi DPRD.

Format kebijakan otonomi daerah yang ada pada saat ini menandai awal dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Kalau pada pemerintahan orde baru, pembangunan menjadi misi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terpenting pemerintah (*developmentalism*) dan pemerintah yang pada masa itu menjadikan dirinya sebagai pusat kendali proses pembangunan itu (sentralisasi di tingkat nasional), kini harus mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya masyarakat dan harus menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat (*plusentris*) di tingkat lokal. Dengan kata lain arus baru kehidupan politik kita sekarang adalah realitas pergeseran kekuasaan dari pusat (*sentral*) menuju lokus-lokus daerah (*desentral*) dan berbasis pada kekuatan masyarakat sendiri (*society*) (Lembaga Informasi Nasional,2012).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah tersebut, perubahan paradigma sekaligus juga ikut melepaskan makna begemoni paham teknokrasi yang masih terus kita rasakan sekarang ini. Sebuah pemerintahan yang membuat konsep otda sulit melepaskan orientasi pembangunannya, dan kepercayaannya kepada peran negara sebagai mesin pembangunan tersebut (pembangunan oleh negara). Dengan satu tawaran paradigma baru, maka otonomi daerah tidak semata-mata sebagai kesiapan kepastian aparatur daerah, atau menyangkut kesuburan ekonomi pemerintah semata (misalnya: tercermin dalam PAD), tetapi juga soal akses keterlibatan masyarakat, fasilitas perkembangan ekonomi swasta (tercermin dalam PDRB), penegakan asas *good governance*, (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan lain sebagainya.

Selain tuntutan otonomi yang sangat kuat dari Pemerintah Daerah, tuntutan akan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih rasional, proposional, dan nyata tidak hanya sekedar jargon-jargon politik. Demikian pula tuntutan atas pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang bersih (jujur), terbuka (transparan) dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap masyarakat. Dengan demikian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil saja belum cukup, masih harus diperlukan pengelolaan atas keuangan daerah, baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri. Kedepan diharapkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik serta dapat meningkatkan ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan kesejahtraan masyarakat.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling hangat dalam sektor publik dewasa ini dan merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Tuntutan yang gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004, Bangsa Indonesia telah memulai proses

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan yang akan mempengaruhi segala dimensi kehidupan bangsa, baik dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Apalagi setelah keluarnya PP nomor 84 tahun 2014 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka pemerintah daerah di masing-masing wilayah membentuk berbagai macam organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan otonomi dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dunia usaha dan daerah itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan kebijakan berupa Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu dinas yang dibentuk tersebut diantaranya adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur oleh Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2012.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pengembangan dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dan tugas pemantauan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas yang berat dalam mengelola lingkungan hidup, sebab pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu yang mencakup segala aspek kehidupan yang sangat luas dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Semua aspek kegiatan pembangunan tidak lepas dari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keterkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan.

Dilain fihak, dalam rangka mengimbangi perkembangan isu lingkungan yang sangat pesat, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM, baik yang bertanggungjawab atas penanganan masalah lingkungan maupun masyarakat umum. Menurut UU Nomor 23 tahun 2012 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Keterlibatan manusia dalam masalah lingkungan hidup dimulai sejak manusia ada. Hal ini disebabkan manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Makin tinggi kebudayaan manusia, makin beranekaragam kebutuhan hidupnya. Makin besar jumlah kebutuhan hidupnya semakin besar sumber daya yang akan diambil dari lingkungan, berarti makin besar perbuatan manusia terhadap lingkungan.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping menangani masalah pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tugas yang dilaksanakan oleh bagian lingkungan hidup sekretariat daerah pada waktu lalu, juga menangani masalah pertambangan yang biasa dilaksanakan oleh bagian perekonomian sekretariat daerah serta masalah air tanah. Untuk penanganan masalah pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan serta air tanah tersebut dalam hal

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penandatanganan surat ijin / rekomendasi telah ada pelimpahan sebagian wewenang urusan pemerintahan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dengan keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 820/kep. 168.DPLH/2012. Sedangkan untuk mempercepat proses penerbitan surat ijin /rekomendasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan telah dibentuk Tim Koordinasi Proses Penertiban Surat Ijin /Rekomendasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan di Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 503.05 / kep.167 - DPLH / 2012 dengan penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketua I-III adalah para kepala subdin, sekretaris adalah kepala seksi perijinan dan anggota adalah unsur Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Binamarga, Dinas Pendapatan Daerah, unsur Kantor Kesbang dan Trantib, unsur Bagian Hukum, Camat setempat dan Kepala Kelurahan / Desa setempat.

Pertambangan yang dikelola diantaranya pertambangan bahan galian golongan c, dan air tanah yang merupakan jenis pajak daerah kabupaten sesuai UU Nomor 18 tahun 2012 yang diganti dengan UU Nomor 34 tahun 2012. Hasil pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan pasal 4 Undang-undang nomor 25 tahun 2012 bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : 1) hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil perusahaan milik daerah, 4). hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan 5) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sebagai salah satu sumber PADS, maka pajak dari pertambangan bahan galian golongan c dan air tanah perlu dikelola dengan baik agar mempunyai dampak positip terhadap peningkatan pendapatan daerah dan meminimalisasi dampak negatifnya. Tetapi berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup maupun pertambangan serta air tanah mempunyai dampak negatif antara lain: sumber daya alam tidak lestari (*anrenewable*), tofografi, hutan flora terganggu, pencemaran sungai dan mata air (kandungan lumpur yang tinggi), jalan dan prasarana lainnya menjadi rusak dan pada tingkatan yang lebih parah tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan karena longsor.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberi kewenangan menangani pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dan air tanah, perlu berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan. Aspek sumber daya yang tersedia dalam organisasi merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Notoatmodjo,2012).

Namun demikian dalam kenyataanya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mempunyai kendala antara lain kurangnya tenaga teknis, peraturan-peraturan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

daerah tentang bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan masih dalam proses pembahasan, masih kurangnya dana operasional dan sarana untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan serta tingkat kesadaran pengusaha dan masyarakat yang masih kurang (LAKIP Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Aceh Tengah, 2012).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu di tempuh usaha-usaha melalui perbaikan kinerja organisasi, agar segala dampak negatif dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dapat dihindarkan serta dampak positipnya dapat ditingkatkan.

Dalam konteks organisasi publik, penilaian kinerja organisasi merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya kinerja maka akan diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicapai, atau akan diketahui seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan.

Pendapat-pendapat para ahli tentang kinerja organisasi menyiratkan bahwa pengukuran kinerja sesungguhnya sangat penting untuk melihat sampai sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai. Dalam konteks demikian maka penelitian mengenai kinerja organisasi yang dilekatkan pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi memiliki makna penting, terlebih lagi Dinas dimaksud memiliki kaitan tugas untuk mengelola persoalan lingkungan hidup yang belakangan ini menjadi isu yang cukup mendasar seiring dengan perkembangan pendekatan *sustainable development*.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari adanya persoalan dalam kinerja organisasi publik, termasuk masalah yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup yang kemudian berubah menjadi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam mengelola lingkungan hidup termasuk pertambangan, mendorong penulis untuk meneliti tentang sampai sejauh mana kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah .
2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi kinerja Dinas Pengelolan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah .
2. Untuk mengkaji Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan awal bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kinerja aparatur sipil negara

b. Diharapkan bisa menjadi pemicu untuk penelitian lanjutan bagi para peneliti yang ingin mengembangkan ilmu Kinerja Aparatur Sipil Negara

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pengelolan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Mengkaji kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupten Aceh Tengah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya bidang pertambangan, maka konsep yang dianggap relevan untuk menelaah fokus masalah adalah konsep kinerja organisasi, pengukuran kinerja organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi.

1. Kinerja Organisasi

Sebelum membahas masalah kinerja organisasi, terlebih dahulu perlu di bahas tentang masalah organisasi. Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama sekelompok manusia atau orang di bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Etzioni). Lebih lanjut Etzioni, menjelaskan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri : a) adanya pembagian kerja, kekuasaan dan tanggungjawab berkomunikasi, pembagian yang direncanakan untuk mempertinggi realisasi tujuan khusus, b) adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang mengawasi penyelenggaraan usaha-usaha bersama dalam organisasi dan pengawasan. Usaha tersebut untuk mencapai tujuan organisasi, pusat kekuasaan ini juga harus menunjuk secara terus menerus pelaksanaan organisasi dan menata kembali strukturnya untuk meningkatkan efisiensi. c) pengaturan personil misalnya orang-orang yang bekerja secara tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memuaskan dapat dipindahkan dan kemudian mengangkat pegawai lain untuk melaksanakan tugasnya.

Sedangkan Henry (2012) mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu koneksitas manusia yang kompleks dan dibentuk untuk tujuan tertentu, dimana hubungan antara anggotanya bersifat resmi (*impersonal*), ditandai oleh aktivitas kerjasama, terintegrasi dalam lingkungan yang lebih luas, memberikan pelayanan dan produk tertentu dan tanggungjawab kepada hubungan dengan lingkungannya.

Sesuai dengan konsep di atas, maka dalam konteks penelitian ini organisasi yang dimaksud adalah organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya bidang pertambangan.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan, sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang. Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu (Keban, 2011).

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja organisasi, dapat penulis kemukakan sebagai berikut. Jackson dan Morgan (2010) mengemukakan bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang hendak dicapai. Rue and Byar (1981

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam (Keban, 2011) menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau " *the degree ofaccomplishment* " atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Sementara itu, Atmosudirdjo (2012) mengatakan bahwa kinerja juga dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu (*performance, how well you do a piece of work oractivity*). Faustino (2015) memberi batasan mengenai perfomansi adalah suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu - individu anggota organisasi kepada organisasinya.

Selain itu Bernadin dan Russel sebagaimana dikutip Jones (2010) lebih rinci memberikan batasan mengenai kinerja yakni dampak yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode waktutertentu. Menurut Peter Jennergen (dalam Steers, 2005) pengertian kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Selanjutnya Pamungkas (2010) menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja.

Dengan demikian dari konsep yang ditawarkan tersebut dapat dipahami bahwa kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam konteks peuelitian ini, maka pengertian kinerja merupakan tingkat kemampuan aparat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya.

2. Pengukuran tentang Kinerja Organisasi

Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak (Keban, 2011). Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja.

Whittaker (2013) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (dalam LAN, 2015). Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana untuk melaksanakan kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Donald dan Lawton (dalam Keban, 2011) mengatakan bahwa penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilai tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.

Sementara itu, Bernadin (2008) mengatakan bahwa sistem penilaian kinerja harus disusun dan diimplementasikan dengan suatu 1) prosedure formal standar,yang 2) berbasis pada analisis jabatan; dan 3) hasilnya didokumentasikan dengan baik; dengan 4) penilai yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Meskipunpenilaiankinerjatelahberkembangdenganpesat, akantetapipenggunaanpenilaiankinerjadalamorganisasi public belumberkembangsebagaimana yang telahterjadidalam sector swasta. Berdasarkan data empirismenunjukkanbahwapenilaianterhadapkinerja di organisasi public belummerupakantradisi yang populer (Keban, 2011), danbahkanterdapatbanyakperbedaanpendapatmengenaikriteriakinerjapelayanan publik (Dwiyanto, 2012). PerbedaanpendapattersebutmenurutDwiyanto (2012) disebabkantujuandanmisiorganisasi public seringkalibukanhanyasangatkaburakantetapi juga bersifatmulti dimensional.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masukan (*inputs*), keluaran *(output*), hasil (*outcome)*, manfaat *(benefit*) dan dampak *(impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2012) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

Lebih lanjut Mardiasmo menjelaskan bahwa pada umumnya sistem ukuran kinerja dipecah dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

a. indikator input, mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (*output* maupun *outcome*). Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan output yang direncanakan dan yang betul-betul terealisir, instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator output hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh sebab itu, indikator output harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.

c. indikator outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam banyak hal, informasi yang diperlukan untuk mengukur outcome seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu, setiap instansi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur outcome dari output suatu kegiatan. Pengukuran indikator outcome seringkali rancu dengan pengukuran indikator output. Contohnya, penghitungan jumlah bibit unggul yang dihasilkan oleh sesuatu kegiatan merupakan tolok ukur output. Akan tetapi perhitungan besar produksi per hektar yang dihasilkan oleh bibit-bubit unggul tersebut merupakan indikator outcome.

d. indikator benefit, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator outcome. Benefit (manfaat) tersebut pada umumnya tidak segera tampak. Setelah beberapa waktu kemudian, yaitu dalam jangka menengah atau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

jangka panjang dari benefitnya tampak. Indikator benefit menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila output dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu).

e. indikator impact memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit yang diperoleh. Seperti halnya indikator benefit, indikator impact juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact menunjukan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Selim & Woodward (dalam Keban,2011) mengatakan bahwa kinerja dapat diukur dari beberapa indikator antara lain *workload/demand, economy, efficiency, effectiveness,* dan *equity.* Lenvine (1990) (dalam Dwiyanto,2012) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/organisasi non bisnis yaitu : *Responsiveness, responsibility* dan *accountability.* Yang dimaksud *responsivitas (responsiveness)* disini adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik. *Responsibilitas (responsibility)* disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesnai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

baik yang implisit atau eksplisit. Semakin kejelasan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (*elected officials*). Asumsinya disini adalah bahwa para pejabat politik tersebut, karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil-wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi tersebut itu dinilai makin baik.

Dalam kontek penelitian ini maka konsep yang akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah konsep yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan berdasakan data empiris di lapangan (*actionable causes)*, yaitu Akuntabilitas, Responsibilitas dan responsivitas sebagaimana pendapat lenvine (dalam Dwiyanto, 2012).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi

Dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah , penulis mencoba mengacu pada beberapa kerangka teori dan model yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Dengan mengacu pada kerangka teori yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

digunakan para ahli pada penelitian kinerja organisasi, diharapkan kerangka teori tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah , walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan di lapangan (*actionable causes*).

Beberapa pandangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik, yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dapat ditemui dari berbagai kepustakaan yang berusaha menggambarkan kinerja organisasi publik. Suatu organisasi, terlepas dari bagaimana bentuknya organisasi tersebut, apapun tujuan yang akan dicapai, selalu mengharapkan sasaran / target yang telah ditetapkan akan dapat tercapai semaksimal mungkin. Untuk mencapai target tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

Muljarto (2012), menyatakan bahwa organisasi bukanlah sistem yang tertutup (*close system*) melainkan organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk memberi tanggapan atas rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi: *pertama*, lingkungan eksternal yang umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi seperti faktor politik, ekonomi dan sosial, *kedua* adalah lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan iklim organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Higgins (2005) dalam Salusu (2006) menyatakan bahwa ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor stratejik yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positip, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan stratejik dalam mencapai sasarannya; sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain : struktur organisasi, sumberdaya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor stratejik, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya; sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara stratejik, artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundang-undangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi. Tetapi yang jelas, menurut William Cohen (David, 2009) ialah bahwa peluang dan ancaman hadir pada setiap saat dan senantiasa melampaui sumber daya yang tersedia. Artinya, kekuatan yang dimiliki organisasi selalu berada dalam posisi lebih

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lemah dalam menanggulangi ancaman, bahkan dalam mengejar dan memanfaatkan peluang sekalipun.

Sementara itu Steers (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyokong keberhasilan akhir suatu orgaisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok umum. Keempat kelompok umum tersebut adalah:

a. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Jadi, keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dilain fihak, yang dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan dalam produksi, variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.
b. karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek yaitu pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(contoh: kondisi ekonomi dan pasar, peraturan pemerintah), yang kedua, adalah lingkungan intern, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentris, orientasi pada prestasi) yang sebelumnya telah ditunjukan mempubyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh: sikap kerja, prestasi).

c. karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi sifat manusia ini sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan di satu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan-perbedaan individual ini dapat mempunyai pengaruh yang langsung terhadap dua proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektivitas. Yaitu rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkuan identifikasi para pekerja dengan majikannya, dan prestasi kerja individual. Tanpa rasa keterikatan dan prestasi, efektivitas adalah mustahil.

d. kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasi organisasi, meliputi variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan. Peran manajer memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu perusahan melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk menjamin bahwa struktur

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Lagipula adalah tanggungjawab mereka untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar sasaran organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

Sementara itu Joedono (2004) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi antara lain meliputi : 1) faktor kualitas SDM, 2) struktur organisasi, 3) teknologi 4) pimpinan dan masyarakat, 5) bentuk kepemimpinan.

Menurut Bryson (2005) faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi bukan semata bersifat internal seperti input proses manajemen, tetapi juga lingkungan eksternal. Walaupun faktor lingkungan eksternal ini sering kali berada diluar jangkauan intervensi organisasi, namun mengingat keterpengaruhannya yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi, maka kiranya faktor liugkungan eksternal tetap harus menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja suatu organisasi. Lebih lanjut Bryson menyatakan bahwa Perkembangan di lingkungan internal dan eksternalnya, tentunya kembali pada spesifikasi permasalahan yang dihadapinya, apakah permasalahan itu pada aspek inputnya atau aspek proses manajemennya, yang kemudian pada sisi mana dari aspek tersebut yang paling diprioritaskan kembali untuk dibenahi,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

baru kemudian dapat ditentukan upaya-upayarelavan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

Lebih lanjut Bryson menjelaskan bahwa, untuk lebih meningkatkan kinerja dinas tersebut secara teoritis menyeluruh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja, Pertama aspek-aspek input atau sumberdaya-sumberdayanya (*resources)* antara lain : (1) Pengawasan Sumber Daya Manusia; (2) anggaran; (3) sarana dan prasarana;(4) informasi; (5) budaya organisasi. Kedua, hal yang berkaitan dengan proses manajemen dalam dinas seperti : (1) proses perencanaan; (2) proses pengorganisasian; (3) proses pelaksanaan; (4) proses penganggaran; (5) proses pengawasan; (6) proses evaluasi dan sebagainya. Setiap aspek tersebut mempunyai potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja dinas, baik berpengaruh dalam arti negatif (menjadikan lemahnya kinerja), maupun yang positif (meningkatkan kinerja). Disamping faktor internal tersebut, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lingkungan eksternal yang secara langsung maupun tidak ikut mempengaruhi kinerjanya, seperti perubahan-perubahan kondisi politik,ekonomi,sosial budaya dan teknologi, juga pihak-pihak yang terkait dengan penyedian input, misalnya wajib pajak dan para pembuat kebijakan dan sebagainya.

Sementara itu Gogin (2010) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat memberi kontribusi pada keberhasilan implementasi. Kemampuan organisasi akan dipengaruhi (produk dari) tiga hal pokok yaitu: struktur organisasi, personel (*human resources*) dan finansial. Tiga hal tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Lebih lanjut Gogin menjelaskan bahwa meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan jelas (yang memungkinkan untuk diimplementasikan secara mudah) akan tetapi mungkin saja bisa gagal oleh kelemahan struktur organisasi atau kelemahan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisir akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama (struktur, dsb) maka keberhasilan implementasi nampaknya akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, ahli, dan mempunyai motivasi tinggi akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realita. Hal ini akan lebih berhasil lagi apabila juga didukung oleh kondisi finansial yang memadai.

Dengan mengacu pada berbagai teori yang dijelaskan di atas dan dihubungkan dengan fenomena di lapangan (*actionable causes*), maka penulis membatasi hanya melihat pengaruh variabel internal organisasi. Dari variabel yang ada, tidak semua variabel obyek penelitian diungkapkan. Hanya variabel yang dianggap penting saja (memiliki pengaruh besar) yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian kinerja organisasi ini. Jika dikaitkan dengan masalah yang telah dirumuskan, yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah , penulis menggunakan *theoritical frame work* Gogin dan Joedono bahwa struktur organisasi, sumber daya manusia dan finansial berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga faktor tersebut bukan merupakan faktor yang berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, sebagaimana pendapat Gogin(1990), Higgins(1985), Steers(1980), Joedono(1974),dan Jones(1995). Numberi (2000) menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara orang melaksanakan tugasnya (bekerja) dalam organisasi. Lebih lanjut Numberi menjelaskan bahwa ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah didesain, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya.

Hasibuan (2001) mengemukakan bahwa struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan istem pimpinan organisasi. Sedangkan The Liang Gie (dalam Malayu, 2010) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebutuhan kerjasama.

Menurut Hadari Nawawi (dalam Kaho, 2010) ditinjau dari tujuannya, organisasi dapat dirumuskan sebagai,"...*a system of action*" atau sebagai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan ditinjau dari strukturnya, organisasi dapat dirumuskan sebagai susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungan-hubungan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. (Pfiffner, dalam Kaho, 2010).

Flippo (2007) menyatakan bahwa hasil langsung dari proses organisasi adalah penciptaan struktur organisasi. Struktur adalah kerangka dasar dari hubungan formal yang telah disusun. Maksud dari struktur itu adalah untuk membantu dalam mengatur dan mengarahkan usaha-usaha yang dilakukan dalam organisasi sehingga dengan demikian usaha-usaha itu terkoordinir dan konsisten dengan sasaran organisasi. Lebih lanjut Flippo menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk (tipe) dasar struktur organisasi, yaitu struktur lini, struktur lini dan staf, struktur fungsional, struktur proyek.

Kaho(2010), menyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi. Dengan perkataan lain, organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas organisasi tertentu. Asas-asas organisasi terdiri dari : 1) rumusan tujuan dengan jelas, 2) pembagian pekerjan, 3) pelimpahan / pendelegasian wewenang, 4) koordinasi, 5) rentangan kontrol, 6) kesatuan komando.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Struktur Organisasi adalah sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi bekerjasama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Jones, 2005). Perhatian sebuah organisasi terhadap bentuk struktur organisasi dapat membantu organisasi untuk mempersatukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengatur dan mengendalikan keanekaragaman, menghasilkan barang dan jasa, efektivitas organisasi, mengintegrasikan dan memotivasi fungsi-fungsi dan anggotanya, dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

Lebih lanjut Jones (2005) mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan terhadap struktur organisasi. *Pertama*, pendekatan manajemen untuk merespon tantangan yang dihadapi, dimana struktur organisasi dibagi menjadi struktur mekanistik dan struktur organik. Struktur mekanistik mengurangi peranan dan tanggungjawab anggota organisasi. Otoritas pengambilan keputusan yang sentralistis dibentuk dari atas ke bawah secara hierarkis. Sub ordinasi diawasi secara tertutup dan arus informasi secara vertikal. Dalam sebuah struktur mekanistik peranan ditetapkan secara jelas. Sedangkan struktur organik lebih fleksibel dimana anggota organisasi mempunyai inisiatif untuk dapat merubah dan beradaptasi secara cepat ke dalam kondisi yang berubah. Struktur organik memberikan kesempatan untuk budaya yang dapat mengadakan antisipasi dan mempunyai stabilitas dan menghindarkan pengelompokan. *Kedua*, pendekatan efektivitas pengambilan keputusan dan komunikasi. Struktur organisasi terdiri dari struktur organisasi yang pipih dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

runcing. Struktur organisasi yang pipih memiliki sedikit hierarki sedangkan struktur organisasi yang runcing memiliki hierarki yang banyak. Rantai komando yang panjang mengakibatkan komunikasi antar pimpinan dengan bawahan akan memakan waktu yang lebih lama. Pengambilan keputusan menjadi lambat yang akan berakibat pada kelambanan dalam merespon keinginan pelanggan dan pesaing. Berlawanan dengan struktur organisasi yang pipih para manajer lebih memiliki otoritas dan dapat lebih menciptakan motivasi dalam peranan yang seimbang. *Ketiga*, pendekatan spesialisasi dan koordinasi, yang terdiri dari struktur organisasi fungsional, divisional, dan matriks. Tujuan dibentuknya suatu organisasi dengan struktur fungsional atau divisional adalah agar dapat dengan mudah mendayagunakan keterampilan dan sumber dayanya. Sebagai spesialisasi struktur organisasi fungsional dapat meningkatkan keterampilan dan memperbaiki tugas dan kemampuan daya saing organisasi. Struktur organisai matriks adalah penggabungan antara jalur vertikal sebagai pertanggungjawaban fungsional dan jalur horizontal sebagai pertanggungjawaban produksi. Organisasi dengan struktur matriks dikembangkan karena berbagai macam fungsi organisasi dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi matriks sangat pipih, dengan hierarki yang minimal dan fungsi serta otoritas yang terdesentralisasi.

Sementara itu, Sarwoto (2012) menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai pelbagai macam organisasi. Ada empat bentuk organisasi yaitu 1) organisasi garis (*line organization*), dalam organisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ini tugas-tugs perencanan, pengendalian dan pengawasan berada disatu tangan dan garis kewenangan (*line authority*) langsung dari pimpinan kepada bawahan, 2) organisasi garis dan staf (*line and staff organization*), pada umumnya digunakan untuk organisasi yang besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, 3) organisasi fungsional (*functional organization*), adalah organisasi yang disusun beradasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. 4) organisasi panitia (*committee organization*), pada umumnya dibentuk dalam waktu yang terbatas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lebih lanjut Sarwoto mengatakan bahwa struktur organisasi akan nampak lebih jelas dan tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi dan akan memberikan pengertian yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan.

Menurut Ancok (2011) harus disadari bahwa pembentukan suatu oganisasi baik devisi SDM maupun devisi lainnya senantiasa memperhatikan struktur organisasi, karena akan sangat mempengaruhi perilaku pegawai. Organisasi dengan struktur yang kaku dan birokratik akan menghambat tumbuhnya kreativitas pegawai. Selain itu pengambilan keputusan menjadi sangat lamban, dan komunikasi antar unit organisasi menjadi berkurang. Organisasi yang kaku dan terkotak-kotak seringkali meninbulkan pemborosan, karena sumber daya (SDM dan fasilitas) tidak dapat dipakai bersama-sama.

Keban (2011) menyatakan bahwa isu terpenting bagi seorang administrator publik adalah bagaimana meuentukan design struktur organisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi publik tertentu. Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukan batas-batas suatu organisasi formal dan dalam hal apa organisasi tersebut beroperasi. Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa struktur organisasi sangat menentukan dinamika organisasi. Secara teoritis, suatu bentuk struktur organisasi sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor sebagaimana menurut teori kontingensi, yaitu ukuran organisasi, perbedaan dalam unit-unit organisasi, stabilitas lingkungan, tujuan organisasi itu sendiri, karakteristik tugas-tugas yang ada dalam organisasi, karakteristik tenaga kerja, dan pendekatan serta gaya management yang dianut.

Sesuai dengan pendapat di atas, Siagian (2005) menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam konteks organisasional. Artinya, organisasi merupakan wahana dan wadah melalui dan dalam mana berbagai kegiatan dilaksanakan. Ada dua segi yang biasanya mendapat sorotan dalam membahas organisasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijaksanaan dan strategi yaitu struktur dan proses. Struktur ialah hubungan formal antara peranan dan tugas yang harus dimainkan dan dilaksanakan, pendelegasian wewenang, arus informasi baik secara vertikal maupun horizontal, kesatuan arah, kesatuan komando, deliniasi tugas dan tanggungjawab yang jelas. Lebih lanjut Siagian menjelaskan bahwa struktur organisasi yang tidak sesuai dengan tuntutan operasional dapat menjadi penghalang terhadap implementasi yang lancar. Dengan demikian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

gabungan antara struktur yang tepat dan proses yang terintegrasi merupakan salah satu jaminan lancarnya implementasi.

Sementara itu Gogin (dalam Effendi:2012) menyatakan bahwa struktur organisasi yang "*hierarchically integrated*" akan lebih memungkinkan implementasi berhasil, karena komunikasi akan lebih berjalan lancar dan kedekatan unit-unit organisasi dan personel. Implementasi oleh intraorganisasi akan lebih berhasil dibanding interorganisasi (O'Toole, 1983). Jumlah organisasi yang terlibat akan menentukan keberhasilan implemenatasi (Kelman, 1984).

Lebih lanjut Gogin menjelaskan bahwa yang menyangkut sruktur organisasi adalah:

- untuk kebijakan yang secara teknis tidak memerlukan adaptasi dan perubahan, struktur yang sederhana lebih cocok dipilih. Untuk kebijakan yang memerlukan adaptasi struktur yang kompoleks akan lebih cocok.
- Perlunya lembaga (agen) tunggal pelaksana impelementasi. Agen tunggal akan mendukung integrasi hierarki akan tetapi mengurangi fleksibilitas.
- Penyertaan LSM / swasta. Propinsi / Kabupaten sering tidak mungkin melaksanakan kebijakan sendiri, mereka kadang membutuhkan LSM dan bahkan swasta dalam implementasi kebijakan tertentu.
- Perlunya lead agency yang memiliki kewenangan untuk melakukan peran koordinasi (integrasi).

Effendi (2012), menyatakan bahwa dalam adminstrasi negara faktor organisasi mendapat perhatian yang sangat besar. Betapa pentingnya peranan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

organisasi sebagai instrumen yang pokok untuk melaksanakan pencapaian tujuan kolektif dari administrasi negara. Masalah organisasi mencakup lima aspek, yaitu legitimasi, struktur, prosedural/ proses termasuk manajemen, SDM dan Teknologi.

Untuk dapat dijadikan acuan, maka dalam rangka penataan kelembagaan termasuk struktur organisasi, sebaiknya dapat menerapkan manajemen modern sebagai salah satu kecenderungan global (Numberi,2012). Adapun prinsif-prinsif manajemen modern terdiri dari :

a. berorientasi kepada konsumen atau pelanggan
b. menggunakan teknik-teknik yang lebih ilmiah dalam analisis dan pengambilan keputusan
c. bersifat jaringan kerja
d. bekerja di dalam tim
e. organisasi sebagai sistem terbuka
f. desentralisasi.

Selain itu, organisasi pemerintah harus semakin diarahkan menuju kelembagaan yang semakin mampu, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini. Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kebijakan organisasi pemerintah diarahkan pada reformasi kelembagaan menuju organisasi masa depan yang bercirikan:

1) Visi dan misi organisasi jelas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dengan visi dan misi yang jelas, akan dapat disusun organisasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan terutama mampu menyeimbangkan antara kemampuan sumber daya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat

2) Organisasi flat atau datar

Dengan organisasi yang berbentuk flat atau datar berarti struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atan hierarki, organisasi cukup memiliki satu layer di bawah pucuk pimpinan

Dengan bentuk organisasi seperti itu naka proses dalam organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat karena dengan penghematan layer dalam struktur organisasi, maka waktu yang kurang diperlukan akan tereduksi

3) Organisasi ramping atau tidak banyak pembidangan

Dengan orgnisasi yang berbentuk ramping, maka jumlah pembidangan secara horisontal dapat ditekan seminimal mungkin sesuai dengan beban dan sifat tugasnya, sehingga span of control-nya berada pada posisi ideal

4) Organisasi jejaring *(network Organization)*

Dalam era globalisasi dewasa ini, harus ditumbuhkan organisasi jejaring, karena organisasi seperti inilah yang mampu melakukan aktifitas organisasi secara cepat dan efisien. Organisasi yang tidak memanfaatkan networking, cepat atau lambat akan ditinggalkan pelanggan , tertinggal karena kalah bersaing. Untuk itu berbagai kalangan menilai bahwa organisasi yang sukses adalah *"small organization, large networking"*

5) Strategi organisasi pembelajar (Learning Organization)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam suasana perubahan yang sangat cepat dewasa ini, diperlukan organisasi yang mampu mentranformasikan dirinya untuk menjawab tantangan-tantangan dan kesempatan yang timbul akibat perubahan tersebut. Proses transformasi atau belajar dari setiap unsur dalam organisasi tersebut kita kenal sebagai "organisasi pembelajar". Pada akhirnya organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

6) Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan profesional

Hal ini terkait dengan bentuk organisasi yang flat dengan layer struktural yang minimal, maka sejalan itu organisasi lebih banyak diisi oleh pejabat-pejabat profesional atau fungsional yang bekerja berdasarkan kompetisi profesional di bidang tertentu sesuai dengan core business organisasi yang bersangkutan

7) Organisasi bervariasi

Organisasi terbuka untuk memiliki struktur yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, sesuai dengan kondisi dan prioritas misi masing-masing lembaga tersebut. Untuk itu pendekatan uniformitas yang kaku tidak tepat digunakan dalam penataan kelembagaan (Numberi, 2012)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan ditentukan salah satunya oleh struktur organisasi yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dibentuk. Karena struktur organisasi akan menentukan pola prilaku individu dalam pencapaian tujuan organisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Berkenaan dengan pokok bahasan kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, diasumsikan bahwa faktor sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, sebagaimana pendapat Gogin(1990), Higgins(1985), Steers(1980), Joedono(1974), dan Bryson(1999).

Menurut Zainum (2012) sumber daya manusia menempati kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Sependapat dengan hal itu, Amstrong (2010) menjelaskan bahwa sumber daya manusia sebagai harta yang paling penting yang dimiliki suatu organisasi.

Sementara itu, Notoatmodjo (2012) melihat sumber daya manusia dari dua aspek, yaitu a) mutu atau kualitas yang diukur melalui kemampuan fisik seperti kesehatan jasmani, kekuatan untuk bekerja dan kemampuan non fisik misalnya kecerdasan dan mental; b) jumlah atau kuantitas, yaitu banyaknya sumber daya sebagai tenaga kerja dalam suatu organisasi. Lebih lanjut Notoatmodjo, mengatakan bahwa manfaat sumber daya manusia dalam suatu organisasi memegang peranan penting. Fasilitas yang canggih dan lengkapun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

belum merupakan jaminan akan keberhasilan suatu lembaga, tanpa diimbangi kualitas dari staf atau karyawan yang akan memanfaatkan fasilitas itu.

Manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Setiap individu yang masuk dalam organisasi membawa karakteristiknya seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman, komponen karakteristik ini kemudian membentuk prilaku pegawai (Thoha, 2010). Lebih lanjut Thoha menyatakan bahwa organisasi hanya merupakan satu wadah untuk mencapai tujuan dan manusialah yang akan membawa organisasi tersebut mencapai tujuannya.

Esman (2009) menyatakan bahwa barangkali sumber daya yang paling penting untuk sebuah organisasi adalah stafnya yang memiliki pengetahuan dan keahlian serta mempunyai komitmen terhadap program organisasi, dengan kata lain perkataan staf yang berkualitas.

Dalam organisasi pemerintahan, sumber daya manusia sering disebut sebagai aparatur yaitu pegawai yang melaksanakan tugas-tugas kelembagan (Widjaja, 2005). Sedangkan Suradinata (2006), mengemukakan bahwa sumber daya manusia sering disebut sebagai *human resource* tenaga atau kekuatan manusia (energi atau power). Kenyataan yang dihadapi faktor yang sangat menentukan sebagai pemegang kunci tetap ada pada manusianya, sebagai perencana, pelaksana, pengendali, pengawasan maupun evaluasi dan yang memanfaatkan hasilnya.

Simamora (2005) menyatakan bahwa keberadaan sumber daya manusia sangat penting sebagai unsur filosofis. Unsur filosofis itu adalah 1) karyawan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dipandang sebagai investasi jika dikembangkan dan dikelola secara efektif akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam bentuk produktifitas yang lebih besar 2) manajer membuat berbagai kebijakan, program dan praktek yang memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan pribadi karyawan 3) manajer menciptakan lingkungan kerja yang di dalamnya para karyawan didorong untuk mengembangkan dan menggunakan keahlian serta kemampuannya semaksimal mungkin 4) program dan praktek personalia diciptakan agar terdapat keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan kebutuhan organisasi. Setiap organisasi selalu berusaha mencapai tujuannya dengan menggunkan manusia secara efisien dan efektif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan Dinas Pengelolan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya yang tersedia yang dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Dari sumber daya yang tersedia dalam organisasi, sumber daya manusia memegang peranan yang sentral dan paling menentukan. Tanpa sumber daya manusia yang handal, pengolahan, penggunan dan pemanfaatan sumber-sumber lainya akan menjadi tidak efektif, efisien dan produktif. Dalam keadaan yang demikian tidaklah mengherankan bahwa tujuan serta program organisasi yang telah ditetapkan dengan baik akan tetap sulit terwujud secara baik dan benar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Finansial.

Finansial merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, sebagaimana pendapat Gogin (1990) dan Higgins(1985). Soerjadi (2012) mengartikan finansial sebagai biaya atau cost dan anggaran atau budget. Biaya merupakan sejumlah uang yang disediakan dan dipergunakan secara langsung untuk mencapai tujuan kegiatan di dalam suatu proses kelembagaan.

Kaho (2010) menyatakan bahwa faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adanya finansial, dalam suatu organisasi, selain faktor SDM dan sarana fisik lainya, dukungan anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi. Tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi dan program sebaik apapun harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai.

Finansial adalah jumlah dan tingkat ketersediaan dana / anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Aspek finansial meliputi anggaran rutin dan pembangunan dari instansi pemerintah. Karena aspek finansial dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek finansial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan Dinas pengelolan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan ditentukan oleh adanya dukungan finansial, karena untuk operasionalisasi tugas-tugas perlu didukung oleh anggaran yang cukup. Sehingga dengan adanya dukungan anggaran yang cukup tujuan organisasi akan mudah tercapai.

B. PenelitianTerdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis . Namun penulis mengangkat beberapa penelitian yang hampir serupa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

1. Alizar, 2011.Penelitian tentang Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekan Baru dalam era otonomi daerah. Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru bila dilihat dari tugas dan fungsi secara aktual yang dilaksanakannya sehari-hari dalam era otonomi sekarang ini masih rendah dan belum optimal, masih banyak hanya sekedar ide belaka dan belum ditindak lanjuti secara nyata. Rendahnya kinerja Bagian Organisasi dipengaruhi oleh faktor profesionalisme dan faktor struktur.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kesungguhan pegawai dalam bekerja sehari-hari, yang ditandai dengan kurang disiplin.Kemampuan bertugas yang rendah, karena tidak didukung pendidikan, latihan serta kursus dalam bidang Pengawasan Melekat, Kearsipan dan Tata Naskah Dinas serta Pengawasan Melekat, dan Analisis Jabatan, kemudian rendahnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hal tersebut dibuktikan juga dari hasil penelitian aspek pembagian tugas yang belum jelas dan masih terdapat tumpang tindih pekerjaan, begitu pula dari aspek kewenangan yang belum sepenuhnya diserahkan kepada pegawai sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang ada.Kemudian dilihat dari aspek koordinasi dengan Bagian Kepegawaian masih belum terjalin dengan baik dibuktikan dengan belum adanya Bagian Kepegawaian koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam penempatan dan penerimaan pegawai, begitu pula dengan Badan Pengawas Kota juga masih rendah koordinasinya, masih ada temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas.Yang mana semuanya itu mennyebabkan rendahnya faktor struktur yang ada pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

2. Kartini Sembel, 2012. Penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Aparatur pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara serta aktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara. Data yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara denganaparaturpadaSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara sertapihak-pihak yang terkaitdengantugaspokokdanfungsiSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara. Sedangkan data sekunderdiperolehdariSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara sebagai suatu organisasi. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah kinerja sebagai variabel dependen; kepemimpinan dan budaya sebagai variabel independen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur padaSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikatorefektivitas, kualitas layanan dan responsivitas. Penelitianini juga menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan dan budaya sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur padaSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Optimalisasi peran serta kepemimpinan perlu dilakukan untuk memperbaiki / meningkatkan kinerja aparatur pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara di masa yang akan datang yaitu melalui keikut sertaan pegawai pada kursus – kursus , pelatihan teknis fungsional dalam bidang tugas menuju aparatur yang profesional.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Edy Yusuf, 2013. Penelitian ini tentang Kinerja Lembaga Legeslatif (studi tentang Kinerja Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja DPRD serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang Periode 1999-2004. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRD serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Sekretariat DPRD dan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai suatu lembaga organisasi. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Kelembagaan (Organisasi), Sumber Daya Manusia , dan Informasi sebagai variabel independen. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang. Metodeanalisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang Periode 1999-2004 masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas. Rendahnya Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang ini dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yaitu sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia yaitu pendidikan dan pengalaman, serta faktor informasi yaitu sumber informasi yang digunakan, keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi, serta intensitas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menyerap aspirasi masyarakat yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata faktor anggaran dan pembiayaan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Dalam peran serta pemberdayaan DPRD untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang dimasa yang akan datang, perlu diadakan pengenalan dan orientasi melalui pelatihan / kursus terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat daerah serta melalui pengembangan kualitas terhadap sistem persyaratan anggota legislatif melalui partai politik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. KerangkaBerpikir

Gambar 3.1

KerangkaBerpikir

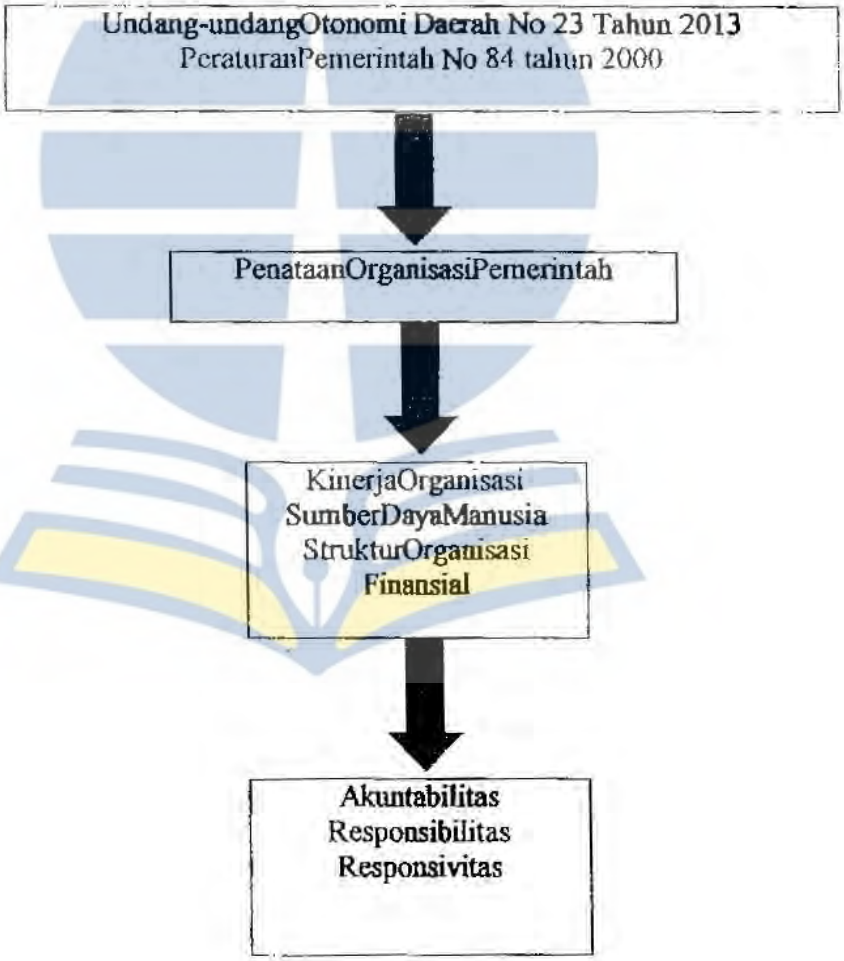

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Definsi Konseptual dan Operasional

Keban (2012) menjelaskan bahwa cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut sebagai definisi konsep dan operasional. Dalam definisi konsep peneliti berusaha menggambarkan batasan dari variabel yang hendak diteliti agar dalam definisi operasional ditonjolkan bagaimana sifat atau karakteristik suatu variabel, dan bagaimana cara pengukurannya sehingga dapat diproses dalam bentuk statistik, atau bahkan analisis kualitatif.

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Atau konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Sedangkan definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut dia akan mengetahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan, dapat juga menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru (Effendi: 2015).

1. Definisi Konseptual

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Untuk memahami konsep tulisan ini, maka penulis mengajukan beberapa definisi konsep sebagai berikut:

a. Kinerja adalah tingkat yang menunjukan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai.
b. Sumber daya manusia adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas suatu instansi / badan/ lembaga.
c. Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukan batas-batas suatu organisasi formal dan dalam hal apa organisasi tersebut beroperasi.
d. Finansial adalah jumlah dan tingkat ketersediaan dana / anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas / badan / lembaga.

2. Definisi Operasional

Dari beberapa kerangka teori, terlihat bahwa struktur organisasi, sumber daya manusia, dan finansial dapat mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah .

Untuk mengetahui kinerja organisasi tersebut diukur dari aspek-aspek sebagai berikut :

1) indikator Akuntabilitas, dapat dilihat dari : a) tingkat konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan aspirasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan pertambangan; b) tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepeduliaan masyarakat terhadap lingkungan ; c) tingkat upaya rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) indikator Responsibilitas, dapat dilihat dari : a) tingkat pelanggaran pengusaha / penambang terhadap aturan; b) tingkat pencapaian realisasi terhadap target pajak; c) tingkat kesesuaian antara perumusan misi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan; d) tingkat antisipasi untuk menghadapi perubahan

3) indikator Responsivitas, dapat dilihat dari: a) tingkat kepekaan terhadap keluhan masyarakat dalam pelayanan perijinan; b) tingkat usaha untuk membina kegiatan para pengusaha / penambang;

Sedangkan independent variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, sebagai berikut:

a. Struktur organisasi, diukur dengan indikator sebagai berikut:
   1) tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi;
   2) tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi;
   3) tingkat pengendalian pegawai dalam pelaksanaan tugas.
b. sumber daya manusia, diukur dengan indikator sebagai berikut:
   1) tingkat ketersediaan pegawai baik secara kuantitas dan kualitas
   2) tingkatpendidikan yang dimilikipegawai
   3) tingkatkemampuanteknis yang dimilikipegawai
c. Finansial, diukur dengan indikator sebagai berikut:
   1) tingkat pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) tingkat ketersediaan anggaran biaya operasional untuk kegiatan pembinaan terhadap pegawai dan masyarakat;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Sugiono (2010) Jenis penelitian dapat dikelompokan menurut tujuan, pendekatan, tingkat ekplanasi dan jenis data. Sesuai dengan fokus penelitian yaitu kinerja Dinas Lingkungan Hidup, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat ekplanasi menggunakan penelitian deskriptif, dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Stuart A Schlegel (dalam Sugiyono, 2010) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

Pada penelitian ini, peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun, 2009). Oleh sebab itu penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa atau keadaan subyek / obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (*fact finding*).

B. Populasi dan Sample / Narasumber

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, dengan narasumber Kadis, Kabid, Kasi, dan Staf Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari stakeholders yang terkait, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh fihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Untuk jenis penelitian kuantitatif, penulis menggunakan data sekunder sedangkan untuk Jenis penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi langsung.

1. Observasi

   Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada. Observasi telah dilakukan antara lain pada daerah pengelolaan lingkungan hidup dan penambangan di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Wawancara.

   Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian, juga untuk merespon berbagai pendapat untuk meningkatan kinerja organisasi yang akan datang. Wawancara dilakukan terhadap "*stakeholder*" yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk masalah pertambangan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dipilih secara "*purposive*", yaitu metode penarikan sampel dengan tujuan tertentu, sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dengan cara ini dapat diperoleh masukan-masukan untuk memperdalam kajian mengenai hambatan dan masalah serta preferensi kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceb Tengah.

Dalam wawancara terhadap informan tersebut menggunakan panduan wawancara, sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan. Wawancara dilakukan kepada Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta Kepala Bagian Tata Usaha, Para Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta masyarakat.

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada para pengusaha / penambang, dengan penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Pemilihan informan untuk pengusaha / penambang disesuaikan dengan konteks data di lapangan.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu (Moleong, 2009). Data-data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait antara lain dari Kantor Bapeda, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Disamping dokumentasi yang terdapat pada kantor-kantor tersebut juga dilakukan pengambilan data dokumen dari perpustakaan.

D. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan ditunjang dengan berbagai argumentasi tinjauan pustaka, diolah serta dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, dilengkapi dengan analisis data sekunder (kuantitatif). Pendekatan data sekunder dimaksudkan agar supaya analisis data kualitatif menjadi lebih komprehensif.

Pertimbangan digunakannya teknik kualitatif dan kuantitatif, adalah mampu menggali informasi yang lebih luas, mendetil dan mendalam dari fenomena yang terjadi, juga dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga kajian yang diperoleh diharapkan dapat mengembangkan konsep.

Adapun proses analisis data meliputi :

1. Penilaian data. Data yang telah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara dan observasi, dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas melalui cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan.
2. Interpretasi data, yang dilakukan dengan cara menganalisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan dan disederhanakan dalam bentuk analisis tabel.
3. penyimpulan terbadap hasil interpretasi data.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat menjawab berbagai masalah menyangkut pertanyaan penelitian ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

Pengelolaan lingkungan merupakan isu yang mencakup segala aspek kehidupan yang sangat luas dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Semua aspek kegiatan pembangunan tidak lepas dari keterkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan. Dilain pihak, dalam rangka mengimbangi perkembangan isu lingkungan yang sangat pesat, seiring dengan berubahnya berbagai kebijakan, berkembangnya perindustrian, serta adanya dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan, maka diperlukan adanya organisasi yang bertanggungjawab atas penanganan masalah lingkungan.

2. Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebelum dibentuknya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, penanganan masalah lingkungan hidup merupakan tanggungjawab dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tengah. Bagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Lingkungan Hidup dibantu oleh kasubag AMDAL dan Kasubag Penanggulangan pencemaran.

Masalah pertambangan BGGC dan air tanah sebelum keluarnya UU nomor 18 tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah, merupakan kewenangan Propinsi Aceh. Sedangkan kewenangan Kabupateu terbatas yaitu menangani perijinan di bawah 5 hektar (Perda Propinsi Aceh Nomor 7 tahun 1995), yang dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk kelembagaan di daerah. Sebagai tindak lanjut pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan berpedoman pada PP Nomor 84 tahun 2000 tersebut, maka di Kabupaten Aceh Tengah telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisa si Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu dinas yang dibentuk diantaranya adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk memahami dengan lebih jelas mengenai struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Struktur Organisasi
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah

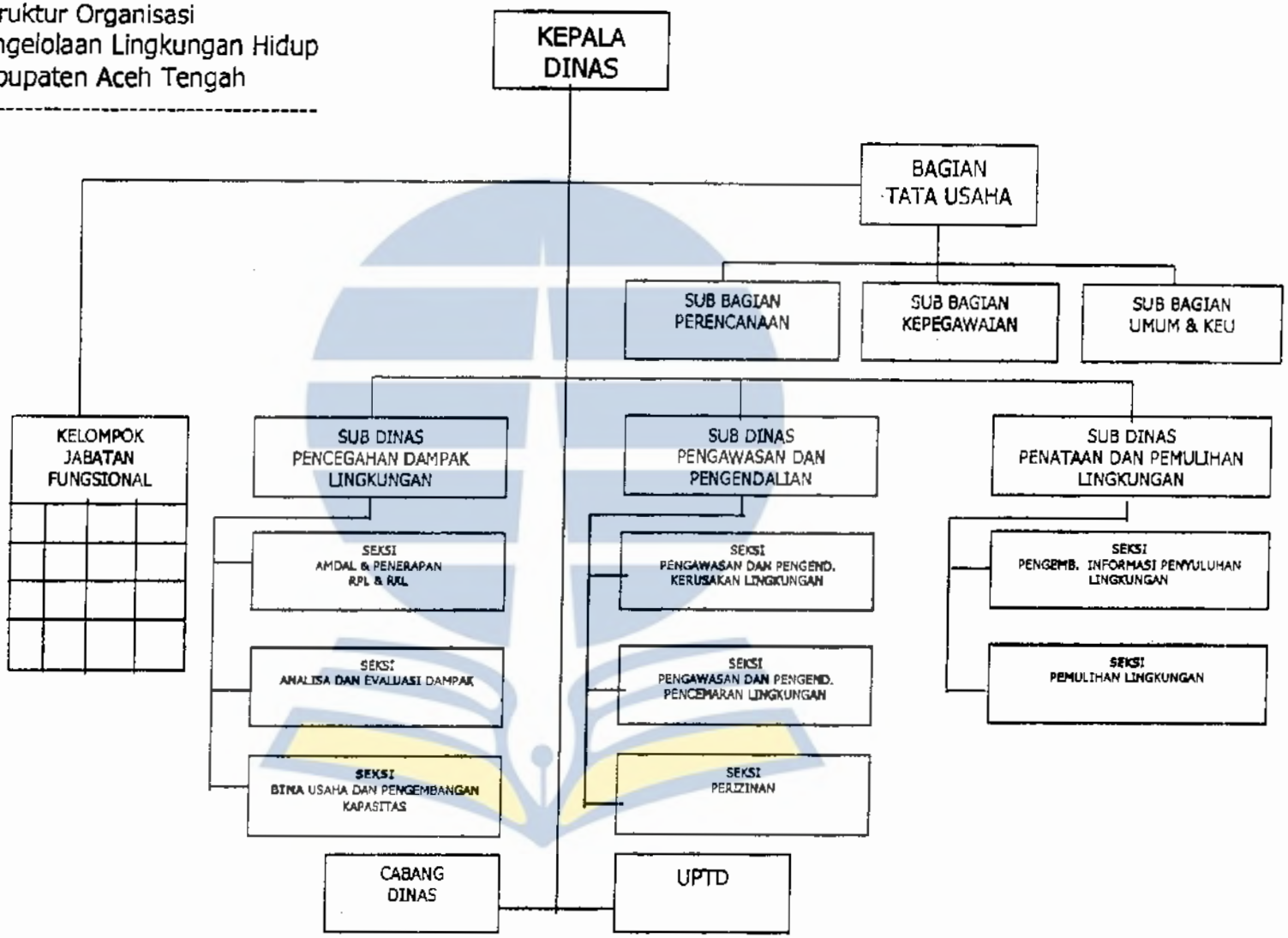

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari bagan tersebut tampak bahwa struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan struktur organisasi yang bersifat Line and Staf, dan struktur ini merupakan struktur yang biasa dijadikan standar untuk organisasi pemerintah di Indonesia. Sebagaimana pendapat Handayaningrat (2002) struktur organisasi lini dan staf cukup baik dipergunakan di Indonesia terutama karena dengan bentuk ini terdapat deliniasi tugas dan fungsi antara unit-unit organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok organisasi dengan unit-unit organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menunjang. Tetapi menurut Jones (2005) bahwa struktur organisasi yang demikian memiliki kelemahan diantaranya banyaknya hierarki, rantai komando yang panjang mengakibatkan komunikasi antar pimpinan dengan bawahan akan memakan waktu yang lebih lama. Pengambilan keputusan menjadi lambat yang akan berakibat pada kelambanan dalam merespon keinginan pelanggan. Untuk itu Jones menyarankan bahwa struktur organisasi yang perlu dikembangkan berbentuk matriks karena berbagai macam fungsi organisasi dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi matriks sangat pipih, dengan hierarki yang minimal dan fungsi serta otoritas yang terdesentralisasi.

Dalam pasal 34 Perda Kabupaten Aceh Tengah Nomor 22 tahun 2000, disebutkan bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup dan tugas pemantauan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dan menurut Pasal 3 Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolan lingkungan hidup termasuk pertambangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau Pemerintah Propinsi Aceh .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a) perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan,
b) pengkoordinasian kegiatan, fungsional dalam pelaksanaan tugas pengelolaan lingkungan hidup termasuk kerjasama dengan pihak lain dibidang pengelolaan lingkungan,
c) pengkoordinasian pengembangan, penerapan, pemantuan, pengawasan dan evaluasi terhadap kajian penerapan lingkungan serta pengendalian teknis, rencana pengelolaan lingkungan (RPL), rencana pemantaun lingkungan serta pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan,
d) peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan, pengembangan, persiapan kerja dan peran serta seluruh mitra lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan,
e) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber dan kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran dan atau kerusakan lingkungan,
f) pengkoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi teknis bidang penataan sistem informasi lingkungan, penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan, g) pemberian bimbingan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembinaan serta mempersiapkan izin pengelolaan lingkungan termasuk izin pertambangan,

g) pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan dan atau bahan tambang yang menjadi wewenang daerah serta konservasi dan reklamasi,

h) pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Visi dan Misi Organisasi

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki Visi : " Menjadi satu dinas pelopor dalam mewujudkan lingkungan hidup sebagai paradigma, etika dan prilaku bagi kehidupan individu, keluarga dan masyarakat untuk menjamin pembangunan Aceh Tengah yang berwawasan lingkungan".

Untuk melaksanakan visi tersebut dan selaras degan program pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017/2018, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai misi: 1) Menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, 2) meningkatkan kehandalan dinas dalam pencegahan, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup, 3) menumbuhkembangkan prakarsa dan gerakan peduli lingkungan di kalangan masyarakat, 4) meningkatkan upaya rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, 5) meningkatkan pembinaan kegiatan usaha agar memiliki keunggulan kompetitif melalui pengelolaan lingkungan hidup secara tahapan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari misi tersebut, diimplementasikan kedalam bentuk tujuan dan sasaran, kebijakan dan program yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan
   a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia / aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
   b. merealisasikan dampak kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   c. meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat tentang masalah lingkungan hidup
   d. meningkatkan rehabilitasi dampak kerusakan lingkungan
   e. menjadikan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
2. Sasaran
   a. Terciptanya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   b. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   c. Meningkatkan kerjasama melalui kemitraan stakeholders
   d. Berkurangnya tingkat kerusakan lingkungan
   e. Tercapainya penerapan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap kegiatan usaha.
3. Kebijakan
   a. meningkatkan kepedulian aparat dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sumber daya alam dan bidup

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan bidup

d. memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup

e. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan

f. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan.

4. Program

a. mengembangkan sumber daya manusia melalui pembinaan aparatur dan masyarakat

b. pengembangan dan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

c. penyebaran informasi masalah pengelolaan lingkungan

d. pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan ramah lingkungan.

5. Kegiatan

a. Mensosialisasikan produk hukum (UU/Perda/ Sk Bupati) yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

b. Mengikutsertakana pada Diklat AMDAL pertambangan, dan penjenjangan karier aparatur

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Mengadakan penyuluhan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi aparat dan masyarakat

d. Mensosialisasikan penerapan AMDAL UKL-UPL bagi kegiatan usaha

e. Menyusun Buku Neraca Kualitas lingkungan hidup daerah (NKDL)

f. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi hutan, tanah, air dan ndara

g. Melaksanakan pengawasan dan monitoing pencemaran limbah industri

h. Melaksanakan monitoring pada usaha yang menggunakan Air Bawah tanah (ABT)

i. Melaksanakan intensifikasi penertiban pemanfaatan air bawah tanah (ABT)

j. Melaksanakan intensifikasi penertiban pemanfaatan air bawah tanah (ABT), pertambangan dan listrik / energi non PLN

k. Mengadakan sarana peralatan laboratorium

l. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan

m. Melaksanakan pelatihan reklamasi terhadap lahan bekas galian c

n. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dan pengendalian

o. Mengadakan sarana mobilitas, bahan kimia dan pengoperasian peralatan laboratorium, pos pengaduan masyarakat

p. Mensosialisasikan teknologi ramah lingkungan kepada masyarakat

q. Mengadakan inventarisasi dan peralatan potensi air bawah tanah (ABT) dan bahan tambang di kecamatan Cibatu, Campaka, Pasawahan, Bungursari, Babakancikao, Jatiluhur dan Plered

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

r. Melaksanakan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat.

4. Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan pasal 5 Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2015 terdiri dari :

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
b. Pembantu Pimpinan adalah bagian tata Usaha
c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas, UPTD dan kelompok jabatan Fungsional

Adapun susunan organisasinya sesuai pasal 6 terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
   1) Sub bagian perencanaan
   2) Sub bagian Umum dan keuangan
   3) Sub Bagian Kepegawaian
c. Sub Dinas pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan:
   1) Seksi Analisa Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL), penerapan Rencana pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana pemantauan Lingkungan (RPL);
   2) Seksi Analisa dan Evaluasi Dampak
   3) Seksi Bina Usaha dan pengembangan Kapasitas
b. Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian membawahkan:
   1) Seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Seksi pengawasan dan pengendalian perencanaan lingkungan

3) Seksi perijinan

c. Sub Dinas Penataan dan Pemulihan Lingkungan membawahkan

1) Seksi Pengembangan Informasi dan Penyuluhan Lingkungan

2) Seksi Pemulihan Lingkungan

d. Cabang Dinas

e. Unit pelaksana teknis Dinas

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dalam pasal 7, disebutkan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup termasuk pertambangan. Sedangkan Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dinas (pasal 8). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan

b. pengkoordinasian penyusunan perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Dinas pengelolaan Lingkungan bidup

c. pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1) sub bagian perencanaan
2) sub bagian umum dan keuangan
3) sub bagian kepegawaian

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bagian Tata Usaha

ad 1) sub bagian perencanaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta penyusunan rencana dan program kerja dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sub bagain perencanaan mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik
b) perencanaan program kerja serta laporan dinas
c) pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup
d) penyiapan bahan penyusunan pedoman organisasi dan tatalaksana dinas
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha sesuai bidang tugasnya

2) sub bagian umum dan keuangan, mempunyai tugas poko melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan inventaris kantor serta administrasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sub bagian umum dan keuangan meunpunyai fungsi:

a) pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan inventaris kantor
b) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas
c) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha sesuai bidang tugasnya

3) sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi urusan kepegawaian pada dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sub bagaian kepegawaian mempunyai fungsi:

a) penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, pembinaan dan pengembangan pegawai
b) pengkoordinasian dalam penyiapan tolok ukur program kerja dan evaluasi kinerja pegawai sesnai dengan bidang tugasnya
c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha sesuai bidang tugasnya.

Sub Dinas pencegahan Dampak Lingkungan, pada pasal 12 mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dinas pengelolaan lingkungan hidup di bidang penceghan dampak lingkungan. Untuk melaksanakau tugas pokok tersebut, Sub Dinas Pencegahan dampak lingkungan mempunyai fungsi:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian kelayakan lingkungan;
b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis terhadap rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas kelembagaan dan mitra lingkungan dalam rangka bimbingan teknis terhadap kegiatan usaha;
d. pelaksanaan penyusunan program teknis pengusahaan pertambangan yang berwawasan lingkungan
e. pengkoordinasian penyiapan baku mutu lingkungan, pelaksanaan analisis serta evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya

Sub Dinas pencegahan Dampak Lingkungan membawahkan:

1) seksi AMDAL dan Penerapan RKL dan RPL
2) seksi Analisa dan Evaluasi dampak
3) seksi bina usaha dan pengembangan kapasitas

Seorang seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sub dinas.

Ad 1) seksi AMDAL dan penerapan RKL dan UPL mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan pengkajian hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup, serta kajian kelayakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lingkungan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi AMDAL dan penerapan RKL dan RPL mempunyai fungsi:

a) penyiapan koordinasi pengembangan, penerapan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan dokumen kajian linkungan lainnya
b) pengkoordinasian penyiapan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan
c) penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengkajian AMDAL dan kelayakan lingkungan
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang tugasnya

2) seksi analisa dan evaluasi dampak lingkungan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis analisa dan evaluasi pencegahan dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi analisa dan evaluasi dampak lingkungan mempunyai fungsi

a) penyiapan koordinasi pengembangan dalam rangka penetapan Baku Mutu Lingkungan
b) pelaksanaan pengembangan pemantauan dan pengujian terhadap Baku mutu yang berlaku
c) pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil penelitian lapangan
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) seksi usaha dan pengembangan kapasitas, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi usaha dan pengembangan kapasitas mempunyai fungsi:
   a) penyiapan program eksplorasi, pemetaan potensi dan pembinaan teknis pengusahaan sumber daya alam termasuk bahan tambang yang menjadi wewenang daerah
   b) pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan mitra lingkungan dalam rangka program pencegahan dampak lingkungan
   c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dinas pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, dan pengelolaan limbah
b. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencemaran lingkungan sebagai akibat kebiatan tertentu berupa pencemaran air, udara serta pengelolaan limbah, serta pengendalian dan pengawasan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kerusakan lahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan hutan, kerusakan keanekaragaman hayati dan perlindungan keselamatan hayati;

c. pemberian pertimbangan dalam rangka pemberian ijin kelayakan lingkungan dan pertambangan daerah serta melakukan pengendalian dan pengawasan keselamatan kerja dalam kegiatan pertambangan;
d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perijinan kelayakan lingkungan, pertambangan, pengolahan dan atau pembuangan limbah;
e. pelaksanaan tugas lain yng diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian membawahkan:

1) seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan
2) seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan
3) seksi perizinan

Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sub dinas.

Ad 1) seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan dalam pengendalian kerusakan lahan dan hutan, kerusakan keanekaragaman dan perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan sumber air. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan mempunyai fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan lahan dan hutan, kerusakan keanekaragaman dan perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan sumber air

c) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang tugasnya

Ad 2) seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan mempunyai fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan

b) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan tertentu berupa pencemaran air, udara serta pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun (B3)

c) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang tugasnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Ad 3) seksi perizinan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyiapan bahan pertimbangan, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian perizinan kelayakan lingkungan dan pertambangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi perizinanan mempunyai fungsi:

a) penyiapan perumusan bahan pertimbangan izin kelayakan lingkungan dan pertambangan
b) pelaksanaan pengolahan dan inventarisasi perizinan kelayakan lingkungan, pengolahan limbah, pembuangan limbah dan pertambangan
c) penyiapan penetapan besaran iuran sesuai dengan aturan yang berlaku
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang tugasnya

Sub Dinas penataan dan pemulihan Lingkungan, mempunyai tugas pokok menkoordinasikan penyelenggaraan sebagai tugas dinas pengelolaan lingkungan hidup di bidang penataan dan pemulihan kualitas lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas penataan dan pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pemulihan lingkungan sebagai akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Pelaksanaan peningkatan peran mitra lingkungan dlam rangka peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi lingkungan dan penyuluhan
d. Pengkoordinasian pelaksanaan penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan;
e. Pelaksanaan bimbingan dalam kegiatan reklamasi, revegetasi terhadap lahan yang dieksploitasi
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Sub Dinas penataan dan pemulihan lingkungan membawahkan:

1) seksi pengembangan informasi dan penyuluhan lingkungan
2) seksi pemulihan lingkungan

Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sub dinas.

Ad 1) seksi pengembangan informasi dan penyuluhan lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan informasi dan penyuluhan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi pengembangan informasi dan penyuluhan lingkungan mempunyai fungsi:

a) penyiapan koordinasi pengembangan sistem informasi lingkungan
b) penyiapan laporan tentang situasi dan kondisi kualitas lingkungan secara makro melalui kepala sub dinas penataan dan pemulihan lingkungan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c) pelaksanaan pengembangan penyuluhan dalam rangka peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkugan

d) pengkoordinasian pelaksanaan penataan hukum lingkungan serta bantuan teknis dalam penyelesaian sengketa lingkungan

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang tugasnya

Ad2) seksi pemulihan lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bhan perumusan kebijakan teknis pemulihan lingkungan sebagai akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi pemulihan lingkungan mempunyai fungsi:

a) penyiapan koordinasi pengembangan dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan

b) pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pemulihan kualitas lahan sebagai akibat timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

c) pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan sebagai akibat timbulnya pencemaran dan kerusakanlingkungan

d) penyiapan rumusan kebijakan teknis dalam rangka reklamasi, dan revegetasi lahan bekas tambang

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang tugasnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam pasal 23 diatur pula pembentukan, organisasi dan tata kerja Cabang Dinas, pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi kriteria umum dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk peraturan daerah.

Dalam pasal 24 diatur pula pembentukan, organisasi tata kerja unit pelaksana teknis dinas, pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi kriteria umum dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk peraturan daerah.

Dalam pasal 25, Kelompok Jabatan Fungsional :

1) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas pegelolaan Lingkungan Hidup secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
5) Setiap kelompok jabatan fungsional ditentukan sifat jenis kebutuhan dan beban kerja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2015, dan pada saat penelitian Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 16 jabatan struktural, yang teridir dari satu jabatan eselon IIb, empat eselon IIIa dan 11 eselon IV a, sementara itu jabatan fungsional belum tertata dengan baik, dan Cabang Dinas serta UPTD belum ada.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, telah ada pelimpahan sebagian wewenang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk bidang pertambangan dalam hal penandatanganan surat izin / rekomendasi dari Bupati kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah. Hal tersebut lebih memudahkan dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat/pengusaha.

Selain itu, untuk mempercepat proses penerbitan surat izin/ rekomendasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan telah dibentuk Tim Koordinasi Proses Penerbitan Surat Izin / Rekomendasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan di Kabupaten Aceh Tengah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Keadaan pegawai

Pegawai Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sebagian besar berasal dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat daerah, dan sebagian lagi berasal dari berbagai instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun komposisi pegawai Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Menurut Tingkat pendidikan, 2017

Pendidikan	Jumlah (orang)	%
Sekolah Dasar	1	3,45
Sekolah Lanjutan Pertama	1	3,45
Sekolah Lanjutan Atas	10	34,48
Akademi / D-3	4	13,33
Sarjana / S-1	12	41,38
Pasca Sarjana /S-2 dan S-3	2	6,90
Jumlah	30	100,00

Sumber : Kantor Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, nampak bahwa lulusan akademi ke atas, ada sekitar 18 orang atau 60 %. Hal tersebut menunjukan bahwa para pegawai di Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup cukup potensial apabila dilihat dari latar belakang pendidikan. Walaupun Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dinas baru, namun para pegawai umumnya sudah berpengalaman

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan telah bekerja dengan masa kerja yang bervariasi, dan diantaranya ada yang masa kerjanya sudah 20 tahunan.

Sementara itu jika dilihat dari komposisi jenjang kepangkatan nampak pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Menurut Golongan, 2017

Golongan	Jumlah (orang)	%
IIa	1	3,71
IIb	1	3,71
IIc	4	14,81
IId	1	3,71
IIIa	6	22,22
IIIc	9	33,33
IIId	1	3,70
IVa	4	14,81
Tenaga Sukwan	2	7,42
Jumlah	30	100,00

Sumber : Kantor Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, diketahui bahwa pegawai yang mendukung kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang mempunyai golongan III ke atas, ada sekitar 20 orang atau 68,97 %. Hasil pengamatan penulis bahwa dari 20 orang pegawai terbanyak adalah mereka yang memulai karier atau diangkat sebagai pegawai mulai dengan tingkat pendidikan akademi dan sarjana, dan umumnya masa kerjanya kurang dari 20 tahun. Dari 30 jumlah pegawai tersebut, ada 2 orang pegawai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan status sukwan yang dipekerjakan sebagai tenaga kebersihan dan keamanan.

Apabila kita lihat Komposisi pegawai dari latar belakang pendidikan yang mereka tempuh, tidak seorangpun yang mempunyai latar belakang pendidikan dari sarjana pertambangan, geologi maupun elektro, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Keadaan Keuangan / Finansial

Keuangan/ finansial merupakan salah satu sumber yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi organisasi, dan merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas suatu organisasi. Tersedianya anggaran selain faktor sumber daya manusia dan sarana memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi.

Untuk melaksanakan aktivitasnya, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah tergantung pada tersedianya dana melalui APBD Kabupaten Aceh Tengah. Dan menurut informasi anggaran untuk Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah ada dua jenis anggaran yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

a. Anggaran rutin untuk tahun anggaran 2017 berjumlah Rp. 569.933.110,00,- yang diperuntukan :

1) Belanja Pegawai	: 438.533.110,00	76,95 %
2) Belanja Barang	: 80.000.000,00	14,04 %
3) Biaya Pemeliharaan	: 17.000.000,00	2,98 %
4) Biaya perjalanan Dinas	: 28.700.000,00	5,04 %
5) Belanja Lain-lain	: 5.000.000,00	0,88 %
Jumlah	:569.933.110,00	100,00 %

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari data di atas, nampak bahwa biaya perjalanan dinas yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah hanya 5,04 %, sedangkan dana belanja lain-lain yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai sebanyak 0,88 % dari jumlah anggaran yang dialokasikan.

b. Untuk tahun anggaran 2017, dialokasikan anggaran rutin sebesar Rp. 683.737.608,00, yang diperuntukan :

1) Belanja Pegawai	: 491.122.608,00	71,83 %
2) Belanja Barang	: 84.715.000,00	12,39 %
3) Biaya Pemeliharaan	: 41.000.000,00	5,99 %
4) Biaya perjalanan Dinas	: 32.900.000,00	4,81 %
5) Belanja Lain-lain	: 34.000.000,00	4,97 %
Jumlah	: 683.737.608,00	100 %

Dari data di atas menunjukan bahwa untuk tahun anggaran 2017 terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 113.804.498 dibandiugkan dengan tahun 2001, tetapi untuk prosentase masing-masing penggunaan mengalami penurunan. Untuk tahun 2017 ada kebijakan dari Bupati Aceh Tengah untuk mengalokasikan biaya operasional sebesar Rp. 20.000.000,00 yang dimasukan pada pos belanja lain-lain.

c. Anggaran pembangunan tahun 2017 Rp. 280.000.000 yang digunakan untuk empat jenis proyek yaitu:

- proyek pembinaan dan penertiban terhadap pengusaha galian golongan c;
- proyek pengendalian dampak lingkungan;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- proyek pengadaan alat-alat laboratorium;
- proyek neraca kualitas lingkungan hidup daerah.

d. Untuk tahun anggaran 2017, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dialokasikan anggaran pembangunan sebesar Rp. 715.000.000,00 untuk 8 (Delapan) proyek, yaitu:

- proyek intensifikasi penertiban perijinan air bawah tanah (ABT) dan bahan tambang;
- proyek pengendalian dampak lingkungan;
- proyek inventarisasi dan pemetaan potensi bahan tambang dan air bawah tanah (ABT);
- proyek penataan dan pemulihan penambangan galian golongan c;
- proyek penyusunan neraca kualitas lingkungan hidup daerah (NKLD) 2002;
- proyek peningkatan sarana laboratorium untuk analisa limbah cair;
- proyek pengembangan informasi dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- Proyek peningkatan sarana laboratorium untuk analisis limbah cair
- Proyek rehabilitasi Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk tahun anggaran 2017, ada kebijakan dari Bupati Aceh Tengah bahwa anggaran rutin maupun pembangunan ditambah termasuk adanya biaya operasional. Hal tersebut untuk meningkatkan kinerja Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tujuan dan misi organisasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Keadaan sarana kerja

Sarana kerja merupakan salah satu sumber yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi. Para pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya apabila tanpa disertai peralatan kerja, sehingga apabila tidak ada sarana kerja yang memadai maka akan menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Begitupula dengan kehadiran komputer sebagai salah satu teknologi yang dapat memperlancar pekerjaan, apabila di suatu organisasi telah dilengkapi dengan sarana komputer disertai adanya pegawai yang menguasai pengoperasiannya akan memperlancar pekerjaan. Disamping itu adanya kendaraan untuk operasional ke lapangan juga turut menentukan terhadap kinerja organisasi, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan.

Gedung yang digunakan untuk Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan gedung lama bekas Dinas Perhutanan Konservasi Tanah (PKT) dengan kondisi yang masih bagus dan layak pakai dengan luas 120 m2. Sedangkan meubuler yang terdiri dari meja biro, meja ½ biro, kursi, filing kabinet, kursi rapat, meja rapat, lemari kayu, lemari besi, rak besi,dispenser, TV, kursi tamu, kipas angin dan lain-lainnya sebagian berasal dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah dan sebagian lagi merupakan barang baru.

Untuk lebih jelasnya sarana yang ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah nampak pada tabel 2.3 berikut ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 2.3
Sarana Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah, 2017

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	4 unit	2 unit kurang baik 2 unit baik
2.	Mesin Tik	3 unit	1 baik 2 kurang baik
3.	Meubuler	78 unit	72 baik 6 kurang baik
4.	Kendaraan roda 2	3 unit	Baik
5.	Kendaraan roda 4	2 unit	Baik

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, 2017 (diolah)

Dari Tabel 2.3, nampak bahwa sarana untuk menunjang kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagian kondisinya baik karena pengadaan baru setelah terbentuknya Dinas, sedangkan sebagian lagi kondisinya kurang baik karena sarana tersebut di bawa dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah.

Sarana komputer yang ada baru ada 4 unit dengan kondisi 2 unit baik dan 2 unit kurang baik, apabila dibandingkan dengan volume pekerjaan di setiap ruangan memerlukan sarana komputer, dengan demikian hasil pengamatan masih kekurangan 2 unit komputer lagi. Sehingga dalam operasionalnya untuk melaksanakan pengetikan yang menggunakan komputer terpaksa dilaksanakan secara bergilir (gantian), atau menggunakan mesin tik manual.

Kendaraan dinas yang mendukung operasionalisasi tugas ke lapangan, roda empat hanya ada 2 unit yang digunakan satu oleh Kepala Dinas, dan yang satu oleh Kasubdin Pengawasan dan Pengendalian. Sementara itu roda dua ada 3 unit yang digunakan satu oleh kasi perijinan, satu oleh kasubag kepegawaian dan satu lagi oleh kasi bina usaha.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Mengenai kendaraan ini sering menjadi kendala apabila para pegawai mengadakan pemantauan dan monitoring atau kunjungan ke lapangan seperti untuk melayani masyarakat yang meminta izin penambangan dan air bawah tanah, sebelum diberikan ijin perlu diadakan peninjauan ke lapangan, sedangkan lokasinya sangat jauh dari kantor, maka untuk mengatasinya menggunakan kendaraan umum dengan beberapa kali ganti kendaraan.

B. Hasil Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di dalam penelitian, maka isi Bab IV akan dikelompokan dalam Tiga sub-bab. Ketiga sub-bab ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. Sub-bab *pertama* berisi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang dalam konteks penelitian ini dilihat dari indikator akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas. Kemudian dilanjutkan dengan sub-bab *kedua* berisi pembahasan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun variabel-variabel pengaruh yang menjadi fokus penelitian ini adalah variabel struktur organisasi, variabel sumber daya manusia, dan variabel finansial. Sub-bab *ketiga*, berisi keterkaitan antara variabel struktur organisasi, sumber daya manusia dan finansial dengan kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

Untuk mengetahui tentang kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan sesuai dengan misi dan tujuan organisasi, maka dalam pembahasan ini akan mencoba menganalisis pencapaian kinerja Bagian Lingkungan Hidup yang kemudian berubah menjadi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang dilihat dari indicator :

a. Akuntabilitas

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini akan dilihat dari tingkat konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan aspirasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan pertambangan, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan Lingkungan, tingkat upaya rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.

Akuntabilitas organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat *pelaksanaan misi yang pertama* yaitu menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan yang telah diberikan kepada dinas, telah dilaksanakan dengan menerapkan berbagai kebijakan antara lain: kebijakan eksternal berupa perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup baik berupa kebijakan pusat maupun daerah (Propinsi),

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sedangkan kebijakan internal yaitu berupa kebijakan yang sasarannya melalui dinas itu sendiri antara lain: peraturan daerah dan Keputusan Bupati yang berhubungan dengan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas pada dinas itu sendiri di dalam menetapkan satu cara melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Atas dasar itu semua di dalam pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan enam kebijakan sebagai landasan di dalam menentukan arah tercapainya sasaran dan tujuan secara tepat dan kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana strategis yang secara global dapat mencerminkan semua aktivitas / kegiatan seperti yang diamanatkan dalam keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, dan telah sesuai dengan cakupan bidang tugas yang menjadi garapan pada masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga dengan penetapan kebijakan yang ada pada dinas dapat menetapkan sasaran.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah merupakan penjabaran dari Qanun Nomor 3 tahun 2012 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017, diantaranya kebijakan untuk mewujudkan dan memulihkan lingkungan hidup, agar tetap terjaganya keseimbangan kehidupan, kebijakan meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanganan lahan pasca tambang (reklamasi), kebijakan mengendalikan perkembangan kegiatan pertambangan untuk menjaga

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kelestarian lingkungan dan kebijakan memberdayakan / memfungsikan lahan-lahan bekas penambangan untuk menghindari kerusakan lahan banjir dan erosi serta kebijakan mempertahankan luas dan batas-batas kawasan yang telah ditentukan agar tidak diperbolehkan untuk dikonservasi atau dialihfungsikan pada jenis kegiatan lain.

Dibentuknya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Wawancara dengan Bupati Aceh Tengah Menyatakan :

"dalam melaksanakan otonomi daerah, kami sedang melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah sebagaimana telah tertuang di dalam Propeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem kelembagaan aparatur pemerintah daerah, managemen pemerintahan umum dan pembangunan agar efisien dan efektif di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi kegiatan penataan kembali struktur organisasi, mekanisme kerja, dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesesuaian antara tugas dan fungsi, struktur organisasi dan kualifikasi maupun jumlah pegawai, serta terbangunnya hubungan kerja antar organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat. Dan untuk melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dalam mewujudkan misi meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, maka salah satunya dibentuk Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup".

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa maksud dirubahnya Badan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan.

Dalam menerapkan berbagai kebijakan baik yang tertuang dalam Perda Kabupaten Aceh Tengah maupun dalam Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2015 serta Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 820/Kep.168-DPLH/2015, masih ada tugas yang harus ditangani oleh Dinas Pengelolaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lingkungan Hidup tetapi belum tertuang secara formal dalam kebijakan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas bahwa:

"kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah belum semuanya mencerminkan aspirasi masyarakat, karena dalam kebijakannya belum mempunyai perangkat hukum sendiri sebagai payung dalam menjalankan kebijakan, dan saat ini kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Aceh seperti pengelolaan Danau Lut Tawar. Hal tersebut disebabkan dalam pemberian nama Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup belum bisa menampung semua kebijakan dan kegiatan organisasi yang ada dan terkesan seolah-olah hanya menangani kegiatan lingkungan hidup saja, sementara kegiatan yang lain yang harus ditangani seperti pertambangan dan energi belum terkaper, sehingga masih ada masyarakat yang mengurus Surat Izin pertambangan yang datang ke Propinsi, karena masyarakat mengira di Kabupaten belum ada dinas yang menangani pertambangan".

Pernyataan yang dikemukakan Kepala Dinas tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dinas belum sepenuhnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disadari bahwa sebagai dinas yang baru dibentuk, maka dalam pelaksanaannya masih dalam tarap pembuatan perangkat hukum sebagai payung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris DPRK:

"bahwa dinas-dinas yang baru dibentuk umumnya belum mempunyai perangkat hukum sebagai aspek legal formal dalam melajalankan tugas dan fungsinya karena sebagaimana dinas yang baru maka kami berprinsif sambil jalan maka perangkat hukum kami benahi dengan harapan semua kegiatan dinas dapat menampung aspirasi masyarakat. Begitupula dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum semua kebijakau dan kegiatan yang menyangkut masyarakat yang harus dilayani seperti lingkungan hidup, pertambangan dan euergi tertuang semuanya dalam perda. sementara ini kegiatan dinas hanya berlandaskan pada Perda pembentukan dan Keputusan Bupati tentang SOTK saja. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat semua perangkat hukum dapat kami tuntaskan termasuk perda tentang lingkungan hidup, pertambangan dan euergi.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa perangkat hukum merupakan acuan atau landasan yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tugas pokok dan fungsinya. Tetapi berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah ternyata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baru berlandaskan pada Perda Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Lembaga dan Badan di Kabupaten Aceh Tengah, Keputusan Bupati Nomor 17 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 820/Kep.168-DPLH/2016 tentang Pelimpahan sebagian wewenang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dalam hal penandatanganan surat izin/rekomendasi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun wewenang yang dilimpahkan diantaranya penandatanganan surat ijin/rekomendasi tentang surat ijin usaha pertambangan (SIUP), surat ijin pengeboran (SIP), Surat ijin pengambilan air (SIPA) bawah tanah, Surat ijin pengelolaan limbah (SIPL), Surat ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIUP ABT), Surat ijin juru bor (SIJB) dan surat ijin eksplorasi(SIE).

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada yang menyangkut lingkungan hidup, pertambangan dan energi belum ada perangkat hukum yang dijadikan acuan dan masih dalam proses pembahasan di DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Untuk berjalannya kegiatan dinas masih menggunakan perangkat hukum dari pemerintah pusat dan Propinsi Aceh .

Sementara itu dalam upaya meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan, Dinas Pengelolaan Lingkungan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hidup berusaha membuat program pengembangan SDM melalui pembinaan aparatur dan masyarakat dengan kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya mengadakan penyuluhan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup kepada aparatur dan masyarakat dengan jumlah peserta 50 orang, mensosialisasikan penerapan AMDAL,UKL,UPL bagi kegiatan usaha kepada 30 perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, dan memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan hidup kepada 50 orang warga masyarakat.

Berdasarkan pengamatan, kegiatan yang dilaksanakan dinas tersebut baru sampai pada tahap pencapaian target peserta dan penyampaian materi, sedangkan hasil *(outcome)* dari kegiatan tersebut belum terealisasi. Sebagaimana pernyataan salah seorang peserta penyuluhan SDA dan lingkungan, menyatakan bahwa:

> " pada waktu penyuluhan kami diberi materi tentang penegakan hukum lingkungan, penerapan studi AMDAL, UKL dan UPL, dan penataan pemukiman yang berwawasan lingkungan. Setelah itu belum kami terapkan, karena masih bingung sebab menurut hemat kami yang perlu diberi penyuluhan adalah mereka yang melanggar peraturan, seperti perusahaan yang tidak membuat dokumen AMDAL, UKL dan UPL, para penambang liar sehingga jelas sasarannya".

Pernyataan tersebut, jelas bahwa penyuluhan yang dilaksanakan belum sesuai dengan sasaran *(target group)* seperti para penambang liar dan perusahaan yang tidak melengkapi dokumen AMDAL, padahal sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2009 tentang AMDAL, bahwa AMDAL merupakan salah satu syarat pemberian ijin usaha.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis para pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup diikutsertakan pada Diklat AMDAL, Pertambangan dan penjenjangan karier aparatur, yang dilaksanakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

baik di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun tingkat Nasional secara bergantian sejak tahun 2012 sampai sekarang, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Realisasi Pelaksanaan Diklat yang diidkuti Oleh Pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

No	Jenis Diklat yang diikuti	Tempat Diklat	Jumlah PNS yang diikutsertakan (Orang)
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Aceh Tengah	5
2.	Training of Trainer (TOT) AMDAL, UKL dan UPL	Jakarta	2
3	Diklat Teknis Fungsional Kepegawaian	Aceh Tengah	1
4	Diklat Adum Eselon IV	Aceh Tengah	4
5	Pelatihan Pelaksanaan Inspeksi Tambang (PIT)	Bandung	2
6	Pelatihan dan Penyuluhan Aparatur di bidang pertambangan dan energi Angkatan II	Bandung	5
7	Kursus dasar-dasar AMDAL (AMDAL A)	Bandung	4
8	sungai (DAS) Diklat teknis bendaharawan daerah tahun anggaran 2001	Bandung	1
9	Diklat teknis substantif perindustrian dan perdagangan bidang penyusunan dan pengendalian lingkungan	Bandung	2

Sumber : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, diketahui bahwa para pegawai diikutkan pada berbagai jenis diklat diharapkan agar aparatur mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fugsinya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kebijakan dan kegiatan tersebut agar aparatur dan masyarakat mempunyai kepedulian untuk mengelola SDA dan lingkungan hidupnya. Hal tersebut diperjelas dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Dinas:

" kami menyadari bahwa saat ini tingkat kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan masih jauh dari harapan, karena setiap kegiatan manusia selalu berhubungan dengan lingkungan hidup, tanpa disadari setiap aktivitas manusia menimbulkan gangguan pada lingkungan, seperti dalam rumah tangga setiap hari membuang sampah, kendaraan mengeluarkan polusi, pabrik membuang limbah, dan sebagainya. Hal tersebut telah mempengaruhi ekosistem lingkungan hidup. Untuk itu maka perlu adanya upaya baik dari aparatur itu sendiri maupun warga masyarakat agar mempunyai kepedulian terhadap SDA dan lingkungan.

Pernyataan tersebut, juga dikemukakan oleh seorang Kepala Seksi bahwa:

"untuk upaya pencegahau dan penanggulangan pencemaran akibat dampak dari jenis usaha atau kegiatan terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan dan pelestarian daya dukung fungsi lingkungan akibat usaha atau kegiatan, kami telah merancang Keputusan Bupati tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan upaya pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) serta melaporkan surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SP3L). Dimana setiap kegiatan /usaha sebelum oprasionalisasinya perlu menyusun dokumen AMDAL,UKL/UPL atau SP3L tergantung jenis kegiatan/usahanya sehagai salah satu persyaratan ijin usaha, dan bagi mereka yang tidak menyertakan dokumen tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikannya ijin usaha dan ijin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup berusaha untuk meningkatkan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan. Selain hal tersebut di atas, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan ialah dengan mengadakan pemantauan dan pembinaan pada kegiatan usaha / industri yang mencakup aspek pengelolaan lingkungan dan pengambilan air bawah tanah juga

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pertambangan. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, sedangkan segala pembiayaan untuk pembinaan dan pemantauan tersebut dibebankan kepada anggaran rutin dan pembangunan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Dan pada akhir pelaksanaan tugas diwajibkan memberikan laporan dalam bentuk berita acara pemantauan / pembinaan kepada kepala dinas.

Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan agar aparatur dan masyarakat mempunyai tingkat prakarsa dan kepedulian terhadap SDA dan lingkungan tetapi berdasarkan pengamatan dan data yang ada, tingkat prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari masih adanya perusahaan yang belum menyusun dokumen AMDAL,UKL/UPL maupun SP3L. Dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2001 sebanyak 101 perusahaan besar, sampai saat ini baru tercatat 50 perusahaan yang telah mempunyai AMDAL,UKL dan UPL maupun SP3L, sedangkan dari 51 perusahaan lainnya sampai saat ini baru 24 perusahaan menyampaikan dokumen UPL,UKL dan SP3L ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Sesuai dengan aturan bahwa perusahaan diwajibkan memberikan laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan per enam bulan sekali, tetapi kenyataannya yang melaporkan hanya ada 15 perusahaan yang menyampaikan laporan secara rutin. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa tingkat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kesadaran dan kepedulian para pengusaha terhadap pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai perusahaan menyatakan bahwa:

" kami selaku fihak swasta selalu ingin mentaati peraturan yang ada jangan sampai perusahaan kami ditutup gara-gara tidak mentaati peraturan, sebetulnya kami telah menyampaikan laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan perusahaan ke Dinas perindustrian secara rutin setiap enam bulan sekali. Dan kami belum tahu bahwa sekarang harus disampaikan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup".

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa fihak swasta selalu ingin mentaati peraturan, tetapi disisi lain keberadaan Dinas itu sendiri sebagai dinas yang baru belum diketahui oleh pihak perusahaan. Untuk itu maka perlu upaya mensosialisasikan kembali tentang tugas-tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar semua masyarakat mengetahui serta peduli akan perlunya pengelolaan lingkungan SDA dan lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada, permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengelola SDA dan liugkungan adalah pencemaran. Dan sesuai dengan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Meuteri Negara Lingkungan Hidup, sumber-sumber pencemaran yang perlu diperhitungkan dalam evaluasi terhadap beban pencemaran adalah: pencemaran udara, pencemaran air dau pencemaran limbah padat.

a. Tingkat pencemaran udara di Kahupaten Aceh Tengah berdasarkan uji petik kualitas udara yang dilakukan PPLH-UNSYIAH Tahun 2012 bekerjasaua dengan bagian lingkungan hidup dibeherapa lokasi di Kabupaten Aceh Tengah yang dianggap menerima dampak pencemaran

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

baik yang bersumber dari emis bergerak akibat padatnya lalu lintas kedaraan bermotor (roda dua maupun roda empat), maupun sampel yang berdekatan dengan lokasi pabrik atau industri. Ada beberapa lokasi yang menunjukan angka tertinggi atau mendekati ambang batas untuk Nox (92,5 ug/m kubik) yaitu:

- pertigaan masuk South Pasific (Industri) besar 74,41 ug/m kubik
- perapatan jala depan kantor Kecamatan Aceh Tengah sebesar 74,41 ug/m kubik
- depan Kantor Pegadaian Pasar rebo sebesar 71,41 ug/m kubik
- terminal sadang sebesar 70,44 ug/m kubik
- lainnya di bawah 2.260 ug/m kubik

Sedangkan unsur CO2 (92,5 ug/m kubik) terletak dilokasi :

- Kampung Taroko sebesar 2.240 ug/m kubik
- Terminal Simpang sebesar 2.020 ug / m kubik
- Depan Kantor Pegadaian Pasar rebo sebesar 2.112 ug / m kubik
- Perapatan jalan Depan Kantor Kecamatan Aceh Tengah sebesar 2.211 ug/m kubik
- Lainnya di bawah 2.000 ug/m kubik.

b. pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat atau energi dan komponen lain ke dalam air / badan air dan berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia oleh proses alam sehingga kualitas air turun ketingkat tertentu yang menyebabkan air tersebut menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Inventarisasi sumber-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sumber pencemaran air di Kabupaten Aceh Tengah antara lain berasal dari effluent industri pengolahan dan limbah domestik, sedangkan dari kegiatan lain belum diperhitungkan.

Dari data yang ada hasil analisis terhadap limbah cair dari 19 industri textil, kertas, Cat, bumbu dan industri keramik yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta II pada tahun 2000 yang dijadikan sampel, terdapat 6 industri yang parameter BOD dan COD dari limbah cairnya tinggi, yaitu PT Hanseung Betel Textil, PT Taroko Indonesia, PT Artha Graha Mulya, PT Hakim Bangun Prima, PT Gede Karang dan PT Nipsea Paint. Masih tingginya parameter tersebut di atas kemungkinan IPAL yang ada tidak dioperasikan, kapasitas IPAL sudah tidak mencukupi di atas IPAL yang ada / dibuat tidak memenuhi standar oleh perusahaan tersebut dan masih kurang disiplin dalam mengoperasionalkan IPAL yang mereka miliki.

Selain itu, pencemaran air yang disebabkan dari kegiatan domestik memberikan kontribusi total beban pencemaran limbah cair di Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut disebabkan banyaknya rumah tangga yang belum memiliki sarana pembuangan limbah cair yang disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan masyarakat dan pentingnya upaya pengolahan limbah domestik terhadap beban pencemaran lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup.

c. pencemaran limbah padat, adalah akibat buangan berupa padatan lumpur, atau bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan baik dari industri maupun kegiatan domestik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari data tersebut, menunjukan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap SDA dan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian upaya yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemda Aceh Tengah dalam bidang peningkatan fungsi lingkungan hidup, yang diarahkan guna mewujudkan dan memulihkan lingkungan hidup agar tetap terjaga keseimbangannya melalui pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan hukum kelembagaan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup belum tercapai.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah untuk merehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, hal tersebut sesuai dengan *Pelaksanaan misi yang kedua*, meningkatnya kehandalan dinas dalam penegakan pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tujuan meminimalisasi dampak kerusakan SDA dan lingkungan hidup. Adapun sasaranya adalah terkendalinya eksploitasi dan eksplorasi SDA, kerusakan lingkungan dan pencemaran air, tanah serta udara. Untuk melaksanakan misi tersebut dibuat kebijakan yaitu memanfaatkan potensi SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi SDA dan lingkungan hidup.

Adapun program yang dilaksanakan yaitu pengembangan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengendalian SDA dan lingkungan hidup, dengan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5 :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 2.5

Rencana dan Realisasi Kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2017

No	Jenis Kegiatan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	menyusun buku Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) untuk dijadikan acuan dalam berbagai kegiatan baik pengusaha maupun masyarakat	3 buku	3 buku	Untuk tahun 2017 masih dalam proses
2.	melaksanakan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi hutan, tanah, air dan udara	4 kali	4 kali	
3.	melaksanakan monitoring pada usaha yang menggunakan air bawah tanah (ABT)	20 prshn	20 prshn	
4.	melaksanakan pengawasan dan monitoring kegiatan usaha pertambangan	17 prshn	17 prshn	
5.	melaksanakan pengawasan dan monitoring pencemaran limbah industri	48 prshn	48 prshn	
	melaksanakan intensifikasi penertiban ABT, pertambangan dan non PLN			
	mengadakan sarana peralatan laboratorium.			

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Dari tabel 2.5, jelas bahwa kegiatan yang dilaksanakan di atas dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dinas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari rencana belum seluruhnya terlaksana seperti untuk melaksanakan intensifikasi penertiban ABT, pertambangan dan non PLN baru mencapai 43,33 % perusahaan pemakai ABT

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang mempunyai SIP ABT, sehingga perlu kerja keras dari aparatur Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya buku NKLD diharapkan dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, sedangkan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan monitoring dengan tujuan adanya perubahan prilaku masyarakat yang dibina, perusahaan memenuhi standard baku mutu lingkungan, terkendalinya penggunaan air bawah tanah, mendorong perusahaan untuk mempunyai SIPD serta mendorong peningkatan permohonan ijin ABT, pertambangan dan energi.

Selain itu upaya yang dilaksanakan Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah untuk merehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan *Pelaksanaan misi yang keempat*, meningkatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi kerusakan SDA dan lingkungan hidup, dengan tujuan meningkatkan rehabilitasi dampak kerusakan lingkungan. Adapun sasarannya adalah berkurangnya tingkat kerusakan lingkungan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut dibuat kebijakan yaitu meningkatkan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. melaksanakan pembinaan kegiatan reklamasi terhadap lahan bekas galian golongan c, dengan cara melaksanakan kegiatan pengukuran dan pembinaan terhadap pengnsaha galian c dengan membuat pemetaan dan plot reklamasi,
b. monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dan pengendalian, dengan kegiatan mengadakan pelatihan / penyuluhan kepada 50 orang pengusaha / penambang,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan harapan meningkatnya kesadaran para pengusaha galian golongan c dalam hal pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan,

Selain kegiatan tersebut, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas pertambangan Propinsi telah melakukan reklamasi di lahan bekas tambang galian golongan c yang berlokasi di Kecamatan Atu Lintang, dengan luas 5 (lima) ha. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Dinas, yang menyatakan bahwa:

" kegiatan pertambangan disamping mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Dampak negatif yang dapat terjadi akibat kegiatan penambangan antara lain berupa gangguan terhadap kondisi sosial masyarakat, pencemaran air dan udara, kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi lingkungan lahan pasca penambangan. Terjadinya dampak negatif ini secara umum disebabkan oleh kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali, yang dilakukan tanpa perencanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta tidak mengikuti kaidah-kaidah yang benar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam upaya merehabilitasi lahan pasca penambangan tersebut, Kami bersama-sama Dinas pertambangan Propinsi Aceh telah melakukan reklamasi yang mudah-mudahan kegiatan tersebut dijadikan contoh bagi para penambang dalam melakukan reklamasi lahan bekas penambangan dan terciptanya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan serta terjaminnya pemanfaatan fungsi lahan".

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa upaya rehabilitasi yang dilakukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Pertambangan Propinsi Aceh merupakan suatu kegiatan yang perlu dijadikan contoh oleh para pengusaha/penambang.

Berdasarkan pengamatan, mengenai lahan bekas tambang yang telah direklamasi di Kabupaten Aceh Tengah, yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah baru dua lokasi yaitu satu dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Propinsi Aceh yang bekerjasama dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tengah pada tahun 2018 dengan biaya dari anggaran pembangunan Propinsi Aceh, yang kedua yang dilaksanakan oleh Dinas Perhutani Kabupaten Aceh Tengah, itupun dilaksanakan karena lahan penambangannya berada di areal tanah perhutani.

Sesuai dengan Perda Propinsi Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan, bahwa yang wajib melaksanakan reklamasi adalah para pengusaha/ penambang pada pasca tambang, dengan biaya yang digunakan adalah berasal dari Deposito Bank, yang sertifikatnya disimpan di dinas sebagai salah satu persyaratan untuk ijin usaha penambangan.

Berdasarkan pengamatan, lahan bekas tambang sebagian besar dibiarkan dan pemulihannya dibiarkan secara alami. Selain itu ada pula yang lokasinya di jadikan kolam, atau yang tadinya berupa bukit atau tebing dijadikan tempat tinggal.

Dari uraian di atas, jelas bahwa upaya reklamasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceb Tengah terhadap lahan pasca tambang belum optimal dan perlu dicari jalan keluarnya untuk menangani lahan pasca tambang agar menjadi lahan produktif.

b. Responsibilitas

Dalam kaitannya dengan responsibilitas ini akan dilihat dari apakah pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi, yang diukur dengan tingkat pelanggaran pengusaha termasuk penambang terhadap aturan, tingkat kontribusi penerimaan pajak pertambangan dan ABT terhadap PAD, tingkat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kesesuaian antara perumusan misi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan, serta tingkat antisipasi untuk menghadapi perubahan.

Responsibilitas Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat dari *pelaksanaan misi yang kelima* yaitu meningkatkan pembinaan setiap kegiatan usaha melalui integrasi lingkungan hidup, dengan tujuan menjadikan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Adapun sasaranya adalah tercapainya penerapan pengelolaan lingkungan pada setiap kegiatan usaha. Untuk mencapai sasaran dan tujuan dibuat kebijakan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan, dengan program pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan SDA secara optimal dan ramah lingkungan. Adapun kegiatannya adalah mensosialisasikan teknologi ramah lingkungan kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk pengusaha / penambang terhadap kewajibannya adalah telah dilaksanakannya pembinaan dan penertiban terhadap pengusaha bahan galian golongan c yang dibiayai dari anggaran pembangunan pada tahun anggaran 2017 dengan target tercapainya tertib administrasi dan teknis pembangunan bagi para pengusaha tambang galian golongan c.

Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha / masyarakat, tetapi berdasarkan hasil pengamatan dan berdasarkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4346.pdf

data yang ada masih terdapat penambang yang tidak mempunyai SIPD (liar). Hal tersebut juga dikatakan oleh seorang Kepala Sub Dinas bahwa:

"masalah yang krusial dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini adalah masalah penggalian liar yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam menaganinya kami tidak bisa saklek dengan menutup usahanya, karena ada pertimbangan lain dalam mencari solusi. Kami menginginkan semua stakeholders terlibat dan ikut memikirkan jalan keluarnya agar kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua stakeholders".

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa masalah penambangan liar merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang dalam mengatasinya perlu penanganan yang serius.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang Kepala Seksi, bahwa:

"dalam menghadapi masalah penambang liar bagi kami jadi buah simalakama, karena para penambang liar umumnya mereka adalah masyarakat kecil dengan pendidikan mereka yang rendah dan lahan yang digarap relatif sedikit serta jenis usaha yang relatif kecil, tetapi berdasarkan aturan mereka diharuskan memenuhi syarat-syarat untuk kegiatan usaha yang relatif banyak, yang otomatis memerlukan pemikiran dan biaya. Karena sesuai dengan aturan, para pengusaha dalam mengajukan SIPD disamping harus membuat AMDAL, UPL dan UKL, juga harus menyetorkan biaya reklamasi dalam bentuk Deposito untuk dijadikan jaminan, dan buku depositonya disimpan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat diambil kembali apabila pengusaha/penambang telah melaksanakan eksploitasi dan reklamasi atas lahan bekas tambangnya".

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa para pengusaha / penambang belum mempunyai kesadaran untuk memiliki SIPD dalam melaksanakan penambangannya. Dan berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, bahwa jumlah pengusaha/penambang yang tidak memiliki SIPD sampai akhir Bulan Mei tahun 2016 sebanyak 27 pengusaha, dan yang mempunyai SIPD sebanyak 23 pengusaha. Selain itu, ditemukan pula perusahaan yang menggunakan air bawah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tanah (ABT) yang tidak disertai dengan surat ijin pengambilan air (SIPA) bawah tanah. Dari 17 perusahaan pemakai ABT di Kabupaten Aceh Tengah, ada 6 perusahaan yang tidak mempunyai SIPA bawah tanah serta tidak ada meteran airnya, sedangkan banya 26 perusahaan pemakai ABT yang disertai dengan surat ijin.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah:

Tabel 2.6
Ketaatan Pengusaha / Penambang terhadap Aturan
Tahun 2017

No	Jenis Usaha	SIPD /SIP ABT/ Dokumen AMDAL, UKL/UPL/SP3L		Jumlah
		Ada	Tidak ada	
1	Penambang BGGC	23	27	50
2	Pemakai ABT	26	61	87
3	Industri	50	51	101

Sumber: Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2017

Dari tabel di atas, diketahui bahwa masih banyak pengusaha yang tidak mempunyai ijin dan tidak mematuhi aturan, seperti tidak mempunyai SIPD, SIPA ABT dan tidak mempunyai Dokumen AMDAL, UKL/UPL serta SP3L.

Untuk mengatasi masih banyaknya penambang yang tidak memiliki SIPD dan banyaknya perusahaan pemakai air bawah tanah yang tidak mempunyai SIPA bawah tanah, maka aparat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup terus berusaha dengan berbagai kegiatan seperti yang telah dikemukakan pada awal bahasan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

seperti kegiatan yang dilaksanakan secara periodik berupa bimbingan, pembinaan teknis maupun administratif, pemantauan serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengusaha, baik pengusaha bahan galian golongan c maupun pengusaha pengguna jasa air bawah tanah (ABT).

Tetapi berdasarkan pengamatan, menunjukan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah untuk mencapai misi dan tujuan organisasi, belum optimal. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya permasalahan seperti banyaknya penambang liar, pengusaha pengguna jasa ABT yang tidak memiliki SIPA BT dan pengusaha yang belum melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Apabila kita melihat segi positif dari pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan, ternyata kegiatan ini telah membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dan juga dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan daerah yang bersangkutan melalui pajak bahan galian dan pungutan-pungutan lainnya. Begitupula di Kabupaten Aceh Tengah perkembangan usaha pertambangan bahan galian golongan c, seperti pasir, sirtu, andesit, kapur dan sejenisnya yang terjadi beberapa tahun belakangan ini serta dari pajak pengambilan air bawah tanah (ABT) telah menimbulkan dampak positif dalam pembangunan fisik maupun ekonomi.

Kontribusi penerimaan dari pajak tersebut untuk di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat dari perkembangan selama 6 (enam) tahun terakhir sebagaimana tabel 2.7 di bawah ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 2.7

Perbandingan Penerimaan Retribusi/Pajak dari Pertambangan Bahan Galian Golongan C terhadap PAD Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012/2013 – 2017

No.	Tahun Anggaran	Penerimaan dari BGGC (dalam rupiah)	PAD (dalam rupiah)	%
1.	2012/2013	171.773.096	8.776.374.141	1,96
2.	2013/2014	86.801.753	11.891.883.838	0,73
3.	2014/2015	205.440.465	15.090.611.016	1,36
4.	2015/2016	300.513.535	17.175.750.855	1,75
5.	2016	587.115.893	15.761.757.553	3,72
6.	2017	561.160.000	28.281.060.875	1,98
	Rata-rata	318.800.790,33	16.162.906.379,6	1,97

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2012/2013 – 2017 (diolah)

Dari tabel 2.7 tersebut nampak bahwa kontribusi penerimaan dari retribusi / pajak BGGC terhadap penerimaan asli daerah, relatif kecil yaitu rata-rata selama enam tahun terakhir adalah 1,97 %. Kecilnya penerimaan dari pajak BGGC dapat dimengerti apabila kita bandingkan dengan masih banyaknya penambang yang tidak memiliki SIPD sebagaimna telah dijelaskan dimuka. Hal tersebut sangat berkaitan sebab yang membayar pajak BGGC adalah mereka yang telah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mempunyai SIPD sedangkan para penambang liar pada umumnya tidak memberikan laporan atas hasil tambangnya juga tidak membayar pajak atas hasil usahanya.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh seorang Kepala Dinas bahwa:

"dalam meningkatkan penerimaan daerah dari pajak BGGC, kami bersama-sama Dinas yang terkait telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan sistem jemput bola di lokasi penambangan, mengadakan pemantauan terhadap kegiatan penambangan serta menggunakan sistem target dengan melihat potensi bahan tambang. Tetapi upaya-upaya tersebut tetap belum bisa mendongkrak penerimaan dari pajak BGGC, karena selama ini petugas kami mengalami banyak kendala di lapangan, diantaranya kami kesulitan memungut pajak dari penambang yang tidak memiliki SIPD sebab baik di dalam Perda Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 tahun 1998 tentang pajak pengambilan BGGC serta Keputusan Bupati Nomor 7 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan lahan usaha pertambangan BGGC, para penambang liar tidak boleh mengadakan kegiatan apalagi dipungut pajaknya sebelum mempunyai SIPD.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam meningkatkan penerimaan dari pajak BGGC mengalami kesulitan, karena kurangnya kesadaran para penambang terhadap SIPD dan membayar pajak atas hasil usahanya, serta belum adanya peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan di Kabupaten Aceh Tengah.

Berbeda dengan penerimaan dari pajak pertambangan, penerimaan pajak dari air bawah tanah, kontribusi terhadap PAD cukup tinggi tetapi dalam pelaksanaanya masih mengalai kendala dari para pengusaha yang menggunakan air bawah tanah (ABT) sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Untuk melihat kontribusi penerimaan dari pajak ABT dapat dilihat dari penerimaan selama kurun waktu empat tahun dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.8

Kontribusi Penerimaan dari Pajak ABT terhadap Pendapatan Asli Daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2014/2015 – 2017

No.	Tahun Anggaran	Penerimaan dari Pajak ABT (dalam rupiah)	PAD (dalam rupiah)	%
1.	2014/2015	3.247.145.710	15.090.611.016	21,52
2.	2015/2016	4.100.617.516	17.175.750.855	23,87
3.	2016	3.234.358.000	15.761.757.553	20,52
4.	2017	4.261.677.690	28.281.060.875	15,07
	Rata-rata	3.710.949.729	19.077.295.074,7	19,45

Sumber: Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 (diolah)

Dari tabel 2.8 di atas, nampak bahwa kontribusi penerimaan dari pajak air bawah tanah (ABT) terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengah cukup tinggi dengan rata-rata selama empat tabun sebesar 19,45 %. Hal tersebut disebabkan bahwa Kabupaten Aceb Tengah memiliki potensi sektor industri yang cukup besar, apalagi dengan dicanangkannya lokasi kawasan industri seluas 2.000 hektar yang berlokasi di wilayah Kecamatan Aceh Tengah dan Kecamatan Celala, dengan jumlah perusahaan berskala besar pada tahun 2016 sebanyak 50 perusahaan, telah membawa kontribusi bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017 sebanyak 54.970 orang juga dalam hal penggunaan air bawah tanah (ABT) juga meningkat. Selain itu banyaknya jumlah industri kecil pada tahun 2017 sebanyak 120 perusahaan, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 27.238 orang, telah memberikan kontribusi dalam penggunaan air. Apalagi jika semua perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil semuanya mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak air bawah tanah (ABT) maka akan membawa kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Aceh Tengah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kenapa penerimaan pajak BGGC dan air bawah tanah (ABT) dijadikan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan Kinerja Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut disebabkan bahwa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan merupakan salah satu urusan yang telah dilimpahkan kepada dinas.

Untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha termasuk penambang dalam perizinan maupun membayar pajak, maka Dinas Pengelolaan Lingkungan hidup telah melaksanakan berbagai upaya sebagaimana telah diuraikan dimuka seperti membuat peraturan, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Dinas, bahwa:

> "mengenai masalah perijinan dan peningkatan penerimaan dari pajak pertambangan maupun ABT untuk aspek legal formal, dan menghindari adanya penyimpangan, kami telah membuat rancangan perdanya yang salah satu isinya, menyatakan bahwa setiap pengusaha / masyarakat yang mengajukan ijin usaha harus membayar retribusi izin untuk biaya ukur dan eksplorasi dan besarannya tergantung luas usaha dan jenis usaha, karena sementara ini pembuatan izin perusahaan tidak dikenakan biaya, yang ada adalah biaya untuk eksplorasi dibebabnkan kepada pengusaha. Tetapi pada kenyataannya untuk membayar biaya eksplorasi para pengusaha banyak yang mengeluh, sementara para petugas kami kesulitan menentukan berapa besaran biaya yang harus dikenakan pada pengusaha, sehingga terjadilah negosiasi antara pengusaha dengan petugas. Untuk itu maka kami telah membuat raperdanya yang diharapkan dapar diterima oleh setiap stakeholders".

Untuk melihat tingkat kesesuaian antara perumusan misi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan, serta tingkat antisipasi untuk menghadapi perubahan, berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada, Dinas Pengelolaan Lingkungan hidup Kabupaten Aceh Tengah berusaha menyiapkan empat buah rancangan peraturan daerah (Raperda) dan 7 (tujuh) buah surat keputusan Bupati, yaitu Raperda tentang pengelolaan air bawah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tanah, pertambangan umum, pengelolaan dan pembuangan limbah cair dan pengelolaan dan pembuangan limbah padat, semuanya masih dalam proses pembahasan di DPRK. Untuk lebih jelasnya Raperda dan SK Bupati mengenai pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini:

Tabel 2.9

Daftar Raperda/SK Bupati mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup Termasuk Pertambangan di Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Raperda/ SK Bupati	Nomor	Keterangan
1	Pengelolaan air bawah tanah	-	Dalam proses pembahasan di DPRK
2	Pertambangan umum	-	
3	Pengelolaan dan pembuangan limbah cair	-	
	Pengelolaan dan pembuangan limbah padat	-	
4	Pembentukan tim Investigasi pencemaran Dan kerusakan lingkungan hidup Kab. Aceh Tengah	660.03/Kep.372-DPLH/2017	
5	Pembentukan tim pengendali pencemaran Dan kerusakan lingkungan hidup (TP2KLH), Kab. Aceh Tengah	660.05/Kep.366-DPLH/2016	
6	Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah	660.01/Kep.367-DPLH/2016 660.05/Kep.165-DPLH/2017	
7	Pembentukan Tim Pengkaji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah	7 tahun 2017	
8	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lahan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah	660.05/Kep.165-DPLH/2017	
9	Penetapan pohon jamuju, ikan balidra dan ikan tawes sebagai khas flora fauna di Kabupaten Aceh Tengah	503.05/Kep.167-DPLH/2017	

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sumber : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2017

Dari Tabel 2.9, nampak bahwa perangkat hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan masih dalam proses pembahasan di DPRK, sedangkan yang menyangkut pembentukan tim untuk kelancaran kegiatan telah ada 4 (empat) buah SK Bupati Aceh Tengah.

Semua peraturan tersebut dibuat dalam rangka menunjang terhadap pelaksanaan misi dan tujuan organisasi untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Selain itu untuk menumbuhkembangkan gerakan peduli lingkungan hidup di masyarakat sesuai dengan *Pelaksanaan misi yang ketiga*, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM tentang masalah lingkungan hidup, dengan sasarannya adalah meningkatnya kerjasama melalui kemitraan dengan stakeholders. Untuk mencapai sasaran dan tujuan dibuat kebijakan memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, dengan program yang dilaksanakan adalah penyebaran informasi masalah pengelolaan lingkungan. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan.

Dari uraian di atas, dalam rangka melaksanakan misi dan tujuan organisasi dalam menghadapi perubahan, berdasarkan pengamatan di lapangan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah melakukan berbagai upaya baik melalui pembuatan perangkat hukum maupun mengadakan pelatihan kepada semua stakeholders. Sebagaimana pernyataan Kepala Dinas bahwa: " kami menyadari bahwa hasil yang dicapai dari kegiatan organisasi belum

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memuaskan karena sebagai dinas yang baru maka selama ini, kami masih dalam proses pembenahan perangkat hukum dan sosialisasi'.

c. Responsivitas

Dalam kaitannya dengan responsivitas ini merupakan kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan, yang akan dilihat dari tingkat kepekaan terhadap keluhan masyarakat dalam pelayanan perijinan, tingkat usaha untuk membina kegiatan para pengusaha / penambang.

Responsivitas Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, jika dilihat dari aspek tingkat kepekaan organisasi keluhan masyarakat terhadap pelayanan perijinan, maka sebagaimana telah diuraikan pada awal bahasan, bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah salah satu fungsinya adalah pemberian bimbingan dan pembinaan serta mempersiapkan ijin pengelolaan lingkungan termasuk pertambangan.

Pemberian izin dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan merupakan salah satu kewenangan dari Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor820/Kep.168-DPLH/2016. Dan untuk proses pemberian izin tersebut, telah dibentuk Tim Koordinasi Proses penerbitan Surat Izin / rekomendasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk bidang pertambangan di Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Bupati Aceb Tengah nomor 503.05/Kep.167-DPLH/2016, yang beranggotakan berbagai unsur dinas terkait dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penanggungjawab Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, dengan tugas :

a. melaksanakan penelitian / pemeriksaan persyaratan adminsistrasi dan persyaratan teknis atas permohonan surat izin/rekomendasi, lingkup bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk bidang pertambangan di Kabupaten Aceh Tengah;
b. melaksanakan penelitian / pemeriksaan ke lokasi yang dimohon, baik keadaan lingkungan dan letaknya ditinjau dari berbagai aspek serta sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah;
c. meneliti kemungkinan timbul gangguan dan bahaya terhadap penduduk dan lingkungan hidup sekitarnya, sebagai akibat adanya kegiatan usaha yang dimohon;
d. membuat berita acara penelitian / pemeriksaan
e. memberikan saran/pertimbangan tertulis kepada pemohon izin / rekomendasi
f. melarang kepada pemohon untuk tidak melakukan apapun di lokasi sebelum surat izin terbit
g. menghentikan kegiatan apapun apabila terjadi di lokasi, kepada pemohon diberitahu / diperingati ternyata telah ada kegiatan sebelum surat izin terbit
h. pemberitahuan penghentian dibuat berita acara
i. menyampaikan laporan tertulis kepada bupati Aceh Tengah.

Adapun persyaratan bagi para pengusaha / masyarakat yang akan melakukan kegiatan / usaha untuk mendapatkan SIPD antara lain diharuskan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

membuat surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan dilampiri:

a. surat bukti pemilikan / penguasaan lahan
b. peta rencana lokasi penambangan yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Surat Pernyataan tidak sengketa atau tidak sedang dijaminkan
d. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekita lokasi rencana penambangan, dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa
e. Surat pernyataan bersedia tidak melakukan kegiatan penambangan sebelum surat izin terbit
f. Buku rencana:
   1) Eksploitasi/kegiatan penambangan
   2) UPL/UKL
   3) Reklamasi
g. tanda bukti lunas PBB
h. Photo Copy KTP pemohon
i. Data perusahaan (badan hukum)
j. Surat rekomendasi dari dinas / kantor / instansi terkait apabila diperlukan
k. Surat pernyataan bersedia menyimpan dana untuk reklamasi pada Bank Pemerintah melalui deposito yang sertifikatnya disimpan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
l. Surat perjanjian kerjasama (apabila ada)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Setelah menerima surat permohonan dari pengusaha / penambang, maka Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta Tim Koordinasi proses penertiban surat izin/rekomendasi mengadakan pemeriksaan baik pada persyaratan adminsitrasi maupun peninjauan ke lokasi penambangan (eksplorasi), kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Tim Koordinasi, dari hasil pemeriksaan kemudian Tim Koordinasi membuat tanggapan atas permohonan izin usaha tersebut apakah menyetujui / belum menyetujui / tidak menyetujui. Apabila disetujui maka dibuatkan SIPDnya tetapi apabila persyaratan belum lengkap, dikembalikan ke pemohon dan apabila tidak disetujui, permohonan ditolak. Begitupula setelah mendapat SIPD dikenakan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepala dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap tiga bulan sekali, laporan produksi satu bulan sekali, pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi, peta kemajuan tambang setiap enam bulan sekali, membayar pajak, biaya kompensasi eksploitasi dan masih banyak lagi kewajiban yang lainnya yang cukup memberatkan pengusaha / masyarakat.

Hal tersebut juga disampaikan oleh seorang penambang yang tidak mempunyai SIPD, bahwa:

"kami menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini belum mengikuti aturan, tetapi untuk membuat ijin, ada persyaratan yang banyak dan menurut informasi dari teman diperlukan uang yang besar untuk proses pembuatan ijin maupun biaya yang harus kami simpan. Walaupun tidak mempunyai ijin, tetapi kami siap kalau diminta membayar pajak"

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

Dari gambaran diatas jelas bagaimana rumitnya untuk mendapatkan SIPD bagi masyarakat yang akan mengadakan kegiatan / usaha, disamping itu persyaratan tersebut berlaku bagi semua masyarakat / pengusaha yang akan melakukan usaha / kegiatan baik menyangkut pengelolaan lingkungan seperti air bawah tanah maupun pertambangan, serta tidak membedakan besaran kecilnya usaha. Hal tersebut diketahui dari wawancara dengan seorang Kepala Seksi , bahwa:

" kami sebetulnya dalam melayani masyarakat yang akan membuat SIPD serba rikuh, disatu sisi aturan harus kami tegakan, di sisi lain kami melihat kegiatan yang akan dilaksanakan masyarakat berbeda-beda, sehingga dalam melayaninya kami lebih banyak mengedepankan negosiasi melihat tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri, dan kami sangat menghargai itikad baik mereka untuk membuat SIPD. Masalah dalam hal perizinan yang kami rasakan adalah perangkat hukum yang mengatur mengenai perizinan ini untuk di Kabupaten Aceh Tengah belum ada, dan masih mengacu ke Perda Propinsi Aceh Nomor 17 Tahun 2016, serta dalam perda tersebut juga belum mengatur secara jelas jenis usaha skala besar dan kecilnya".

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa kegiatan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai kendala dalam hal perangkat hukum sebagai aspek legal formal yang mengatur mengenai perizinan di Kabupaten Aceh Tengah belum ada. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Apabila responsivitas dilihat dari aspek tingkat usaha untuk membina kegiatan para pengusaha / penambang, seperti telah diuraikan terdahulu pada pembahasan akuntabilitas, bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup melaksanakan berbagai upaya untuk membina para pengusaha termasuk penambang dengan tujuan menjadikan kegiatan usaha yang berwawasan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43400.pdf

lingkungan yang sasarannya adalah tercapainya penerapan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap kegiatan usaha, dengan kegiatannya adalah melaksanakan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada, bahwa kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel 2.10 di bawah ini:

Tabel 2.10

Rencana dan Realisasi Kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam membina kegiatan para pengusaha / penambang Tahun 2015-2016

No	Jenis Kegiatan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	mengadakan sosialisasi penerapan AMDAL UKL,UPL bagi kegiatan usaha	30 perusahaan	17 perusahaan	Untuk tahun 2002 belum dilaksanakan
2.	mengadakan penyuluhan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	50 orang	orang	
3.	melaksanakan pembinaan kegiatan reklamasi terhadap lahan bekas tambang	4 kali	1 kali	

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari rencana kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha / penambang, ternyata tidak terealisasi, karena dalam kegiatan sosialisasi penerapan AMDAL UKL,UPL hanya 17 perusahaan yang mengikuti. Juga kegiatan pembinaan nntuk reklamasi hanya satu kali yang dapat terlaksana.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan untuk membina pengusaha termasuk penambang, ternyata masih mengalami masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Dinas, bahwa:

" setelah kami melakukan pemantauan dan monitoring di lapangan, ternyata masih banyak pengusaha yang tidak mentaati peraturan, seperti banyaknya penambang yang tidak mempunyai SIPD (liar), adanya perusahaan yang membuang limbah industri ke badan sungai, banyaknya kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan galian golongan c, adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri dan domestik, adanya bencana yang ditimbulkan oleh industri, baik yang diakibatkan oleh limbah cair, padat dan udara, kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan, dan kurangnya ketaatan pihak pengusaha/industri dalam penyampaian laporan UPL-UKL.

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa kegiatan /usaha masyarakat di satu sisi mempunyai dampak positif tetapi disisi lain mempunyai dampak negatif yang memerlukan perhatian yang serius dari semua fihak baik aparat maupun masyarakat agar segala dampak negatifnya dapat dikurangi dan dampak positifnya ditingkatkan, yang pada akhirnya kesejahtraan masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, membuktikan bahwa ketiga aspek dalam kinerja organisasi Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat dipisahkan, juga membuktikan bahwa masing-masing aspek mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi kinerja organisasi Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan misi organisasi.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

Penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel internal di dalam organisasi yang diduga kuat mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yakni struktur organisasi, sumber daya manusia, dan finansial, yang akan dibahas secara berurutan berikut ini.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting, karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Struktur organisasi ini dapat dilihat dari tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi, tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi, dan tingkat pengendalian pegawai dalam pelaksanaan tugas, yang akan dicoba diuraikan secara berurutan.

Apabila Struktur organisasi dilihat dari tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah akan nampak ketika tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dinas dibagi habis kepada pejabat-pejabat yang ada di dalam organisasi.

Tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan tugas dan kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh Bagian Lingkungan Hidup dan sebagian lagi merupakan tugas Bagian Ekonomi sekretariat daerah sebelum keluarnya Qanun Nomor 22 tahun 2016.

Tugas yang biasa dilaksanakan oleh bagian lingkungan hidup menyangkut mengumpulkan bahan, mengolah data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program perwujudan, pembinaan, penanggulangan lingkungan dan pencemaran termasuk AMDAL. Sedangkan sebagian tugas bagian ekonomi sebelum berubah menjadi bagian sosial ekonomi, yang dialihkan ke Dinas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyangkut perizinan pertambangan dan energi, serta air tanah.

Berbicara masalah tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan dengan struktur organisasi yang ada, ternyata belum semua tugas dan kegiatan termasuk dalam struktur organisasi. Dari penamaan dinas itu sendiri yaitu Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga tidak adanya sub dinas maupun seksi serta sub bagian yang khusus menangani masalah pertambangan dan energi, terkesan dinas tersebut hanya menangani masalah lingkungan hidup saja. Walaupun secara teori pertambagan dan energi merupakan bagian dari lingkungan hidup, tetapi dengan tidak adanya nama pertambangan dan nergi, terkesan dinas tersebut tidak menangani masalah pertambangan dan energi.

Dengan adanya tugas dan kegiatan yang belum termasuk pada struktur organisasi, hal tersebut berdampak pada tingkat pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada staf, seperti masalah pertambangan dibebankan kepada seksi perizinan, padahal di dalam perincian tugas hanya menyangkut pengelolaan, penyiapan bahan pertimbangan, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian perizianan kelayakan lingkungan lingkungan dan pertambangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas menyatakan bahwa:

"Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2016 mempunyai struktur hierarki dalam pengendalian, wewenang dan komunikasi dalam sistem mekanistik. Terus terang saja bahwa struktur organisasi yang ada, belum memadai karena tidak mencakup semua kegiatan yang harus ditangani oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seharusnya struktur organisasi mencakup lingkungan hidup, pertambangan dan energi, sehingga ada kesan dari masyarakat seolah-olah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengurus lingkungan hidup saja dan terkesan sebagai kepanjangan tangan BAPEDALDA Propinsi Aceh . Sehingga ada masyarakat yang mau membuat izin pertambangan masih datang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

ke tingkat Propinsi Aceh karena di Kabupaten belum ada katanya. Untuk itu maka kami telah mengajukan perubahan ke DPRD untuk perubahan struktur organisasi dengan nama Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tengah dengan lebih mengembangkan jabatan fungsional".

Peruyataan tersebut membuktikan bahwa struktur organisasi yang ada belum mampu menampung semua jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan dan data yang ada struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan struktur organisasi line dan staf. Karena dalam struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2016, kewenangan didelegasikan kepada 1) Bagian Tata Usaha yang didelegasikan lagi kepada sub bagian perencanaan, sub bagian kepegawaian dan sub bagian umum dan keuangan, 2) Sub Dinas Pencegahan Dampak Lingkungan yang didelegasikan lagi kepada seksi AMDAL RPL & RKL, Seksi Analisa dan evaluasi dampak, dan seksi Bina usaha dan pengembangan kapasitas, 3) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian, yang didelegasikan lagi kepada Seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan, Seksi Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan Seksi Perizinan, 4) Sub Dinas Penataan dan pemulihan Lingkungan, yang didelegasikan lagi kepada Seksi Pengembangan Informasi & penyuluhan Lingkungan dan Seksi Pemulihan Lingkungan. Sementara itu untuk jabatan fungsional tetapi belum terisi.

Apabila struktur organisasi dilihat dari tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi, maka sruktur organisasi Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang menuntut SDM yang memiliki kemampuan teknis, maka struktur tersebut nampaknya belum memadai. Karena jabatan fungsional yang ada belum diisi, sementara kebutuhan tenaga teknis pertambangan, geologi, elektro dan sebagainya sangat dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian , menyatakan bahwa :

"untuk mengantisifasi perubahan di dalam struktur organisasi telah menyiapkan jabatan fungsional, tetapi sampai saat ini jabatan tersebut belum tertata dengan baik sehingga masih kosong. Padahal kami sangat membutuhkan tenaga ahli tambang, tenaga ahli energi (elektro), dan tenaga ahli lingkungan hidup serta disiplin ilmu lainnya sebagai tenaga profesional. Dan untuk mengatasinya sementara ini kami hanya bisa mengikutsertakan pegawai pada Diklat-diklat pertambangan, lingkungan hidup, AMDAL, energi dan Diklat penjenjangan karier serta diklat-diklat yang lainnya".

Untuk itu perlu adanya kebijakan penataan struktur organisasi yang diarahkan untuk memantapkan fungsi-fungsi organisasi yang diisi oleh tenaga-tenaga pengelola yang profesional yang memenuhi syarat baik jumlah maupun kualitasnya yang lebih mengarah pada pengembangan jabatan fungsional.

Apabila struktur organisasi tersebut mampu memanfaatkan pegawai berdasarkan spesialisasi, maka kemungkinan organisasi dapat berjalan karena orang-orang dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi sebagaimana telah disebutkan dalam tinjauan pustaka. Atau dengan perkataan lain, organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas organisasi tertentu.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dilihat dari perumusan tujuan yang ada sebagaimana telah disebutkan pada deskripsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak nampak tujuan yang menyangkut pertambangan dan energi. Begitupula dalam pembagian pekerjan serta pelimpahan / pendelegasian wewenang belum nampak. Sementara itu pelaksanaan koordinasi baru sebatas pembentukan tim koordinasi proses penertiban surat ijin sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menyangkut lingkungan hidup.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa struktur yang ada membawa konsekuensi terhadap tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi yang terdapat di dalam struktur organisasi.

Sementara itu, apabila struktur organisasi dilihat dari tingkat pengendalian pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dengan struktur organisasi yang ada, maka tingkat pengendalian yang dilakukan oleh kepala dinas terhadap pegawai tidak mendapat kesulitan karena kepala dinas tidak secara langsung mengendalikan tetapi melalui kepala bagian tata usaha atau para kepala subdin yang kemudian kepala bagian tata usaha atau para kepala subdin mengendalikan lagi kepala sub bagian atau kepala seksi baru sampai pada para pegawai.

Tetapi hal tersebut apabila dibandingkan dengan struktur yang matrik yang mengabungkan jalur vertikal dan horisontal, yang dikembangkan karena berbagai macam fungsi organisasi dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, maka tingkat hierarki akan minimal dan otoritas yang terdesentralisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencapai misi dan tujuan organisasi, Dinas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengelolaan Lingkungan Hidup mutlak harus dapat mengkoordinasikan program-program yang ada demi tercapainya misi dan tujuan organisasi. Apabila melihat struktur organisasi yang ada, maka belum terlihat peran dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup seutuhnya, dan terkesan seolah-olah hanya menangani masalah lingkungan hidup semata sedangkan peran lainnya yang harus dilaksanakan belum nampak di dalam struktur organisasi.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan struktur organisasi yang dibentuk sebagaimana telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada sekarang dapat mempengaruhi terhadap kegiatan organisasi dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.

Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasai ketika melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Organisasi dengan struktur yang kaku dan birokratik akan menghambat tumbuhnya kreativitas pegawai. Selain itu pengambilan keputusan menjadi sangat lamban, dan komunikasi antar unit organisasi menjadi berkurang. Organisasi yang kaku dan terkotak-kotak seringkali menimbulkan pemborosan, karena sumber daya (SDM dan fasilitas) tidak dapat dipakai bersama-sama.

Begitupula dengan struktur organisasi yang mekanistik sulit berkembang untuk melakukan inovasi. Organisasi harus mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan prinsif-prinsif administrasi yang benar, serta organisasi harus

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mampu mengenali kebutuhan masyarakatnya, sehingga pelayanan yang diberikan akan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, karena manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Sumber daya manusia ini dapat dilihat dari tersedianya pegawai baik secara kuantitas dan kualitas, tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, dan tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai, yang akan dicoba diuraikan secara berurutan.

Sumber daya manusia yang dilihat dari tersedianya pegawai secara kuantitas dan kualitas yang ada dalam organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, bahwa sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup berjumlah 30 orang termasuk 16 orang merupakan pejabat struktural.

Berdasarkan pengamatan dan data yang ada, dari 30 orang pegawai, mereka berasal dari berbagai instansi seperti 12 orang dari Bagian Lingkungan Hidup, tiga orang dari Dinas PKT, tiga orang dari PKM, tiga orang dari PMD, dua orang dari Koperasi, dua orang dari Bagian Organisasi, satu orang dari Itwil, satu orang dari STPDN (baru masuk) dan satu orang dari Mawil Hansip serta dua orang sukwan (baru) sebagai tenaga keamanan dan kebersihan merangkap pengemudi.

Sesuai dengan volume tugas yang diemban oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, maka dengan 16 jabatan struktural yang ada serta jabatan fungsional yang belum terisi, berdasarkan analisa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebutuhan pegawai, secara keseluruhan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup membutuhkan personil sebanyak 45 orang dengan komposisi latar belakang pendidikan yang mempunyai keahlian Geologi/pertambangan, lingkungan hidup, elektro dan disiplin ilmu yang lainnya.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas , menyatakan bahwa:

" sebagai Dinas yang merupakan pengembangan dari Bagian Lingkungan Hidup, kami masih kekurangan SDM aparatur baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Apabila melihat struktur organisasi yang ada dengan 16 jabatan struktural dan adanya jabatan fungsional serta cabang dinas dan UPTD, dan melihat volume tugas pekerjaan, kami membutuhkan sedikitnya 45 staf pelaksana khusus untuk di dinas, tetapi yang ada sekarang hanya berjumlah 30 orang termasuk pejabat struktural dan dua orang sukwan. Kesulitan kami dengan tugas melaksanakan pemautauan dan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengusaha / industri maupun pertambangan dengan jumlah perusahaan yang relatif banyak sementara jumlah pegawai terbatas, jadi pemantauan /monitoring tidak dapat kami laksanakan setiap saat tetapi dilaksanakan sistem berkala".

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah masih kekurangan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kualitas. Dengan struktur organisasi yang mempunyai empat hierarki dengan 16 jabatan struktural, yang terdiri dari kepala dinas, satu bagian dengan tiga sub dinas, yang masing-masing terdiri dari 3 sub bagian serta 8 seksi, diperlukan SDM pelaksana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa Pegawai atau aparatur pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang melaksanakan tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup termasuk pertambangan dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi, tergantung jumlah pegawai dan kualitas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pegawai, yang dilihat dari tingkat pendidikan formal, sikap mental pegawai dan spesialisasi tertentu yang dimiliki.

Dari jumlah pegawai yang ada, yang berpendidikan S2 hanya dua orang, 12 orang yang berpendidikan S1 dan empat orang D3, 10 orang SLTA, SLTP satu orang dan SD 1 orang. Apabila melihat tingkat pendidikan mereka, bahwa sebagian besar mereka berpendidikan D3 dan sarjana, potensi tersebut cukup menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas, tetapi apabila dikaitkan dengan volume tugas yang harus dilaksanakan maka jumlah tersebut kurang memadai.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada menunjukan bahwa dari 30 pegawai di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, tidak ada satu orangpun yang berlatar belakang pendidikan formal dari pertambangan, dan elektro, padahal dinas disamping mengelola lingkungan hidup juga mengelola pertambangan, sehingga diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan yang bersifat teknis pertambangan, lingkungan hidup termasuk energi. Sementara itu dari pegawai yang ada, hanya ada dua orang yang berlatar belakang pendidikan formal dari sarjana lingkungan dan 1 orang yang berpendidikan dari geologi. Sementara pegawai yang lainnya berlatar belakang pendidikan yang bervaraisi.

Untuk lebih jelasnya mengenai latar belakang pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel 1.11 :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 1.11

Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2002

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Sarjana Perencanaan	1	S2 dari ITB
2	Sarjana Kimia	1	
3	Sarjana Pertanian	1	S2 dari STIA
4	Sarjana Hukum	3	
5	Sarjana Administrasi Negara	4	
6	Sarjana Perhutanan	1	
7	Sarjana Biologi	1	
8	Sarjana Teknik Lingkungan	2	
9	Sarmud Penerangan	1	
10	Sarmud Ekonomi	2	
11	Sarmud Geologi	1	
12	SMA/STM/SMEA	10	
13	SMP	1	Sukwan
14	SD	1	Sukwan
	Jumlah	30	

Sumber : Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Dari tabel di atas, diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan serta energi, maka yang sesuai baru mencapai 10 %. Untuk itu maka untuk menunjang tugas dan kegiatan dinas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perlu merekrut tenaga fungsional yang mempunyai latar belakang pendidikan dari pertambangan, geologi dan elektro.

Untuk berjalannya suatu organisasi harus ditunjang oleh SDM yang berkualitas dalam arti memiliki pendidikan yang cukup yang sesuai dengan tugas pekerjaannya, karena Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Kepala Sub Bagian, menyatakan bahwa:

" sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu mengelola lingkungan hidup, pertambangan dan energi, untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan aparatur yang mempunyai keahlian khusus. Seperti untuk pertambangan seorang aparatur harus menguasai bagaimana potensi atau kandungan bahan tambang yang ada serta memerlukan waktu berapa tahun apabila dieksploitasi. Dan untuk sementara ini, kami mengadakan koordinasi dengan pertambangan propinsi, serta mengikutsertakan pada diklat teknis tertentu. Dengan kondisi tersebut yang dkaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas, kami sangat membutuhkan sarjana yang mempunyai disiplin ilmu dibidang pertambangan (geologi), lingkungan hidup, energi (elektro) dan keahlian lainnya".

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa untuk menangani tugas yang ada di Dinas diperlukan pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan dari geologi /pertambangan, lingkungan hidup, elektro dan disiplin ilmu yang lainnya.

Sumber daya manusia dilihat dari tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai, maka pegawai yang ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Tengah, dari sejumlah 30 orang tersebut, mereka pada umumnya sudah berpengalaman dan telah bekerja dengan masa kerja yang bervariasi. Dan sementara itu dalam rangka menunjaug pelaksanaan tugas dan fungsi, para pegawai diikutkan dalam pendidikan teknis baik yang diadakan di tingkat kabupaten maupun di tingkat Propinsi Aceh. Adapun pendidikan teknis yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diikuti selama tahun 2017 sampai saat ini diantaranya TOT AMDAL, UKL dan UPL, pelatihan pelaksanaan inspeksi tambang (PIT), kursus dasar-dasar AMDAL A, Pelatihan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, Diklat pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), Diklat teknis substantif perindustrian dan perdagangan bidang penyusunan dan pengendalian lingkungan, pengenalan geologi dan sumber daya mineral, Diklat teknis pengelolaan kearsipan, Diklat teknis manajemen proyek (KMPP), pelatihan bidang pertambangan, Diklat pengenalan eksplorasi mineral dan ABT, dan Diklat Struktural SPAMA, SPAMA dan lain-lainya sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan pengamatan bahwa sangat diperlukan pegawai yang memiliki pengetahuan dan keahlian serta komitmen terhadap program organisasi. Berdasarkan pengamatan, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa para pegawai setelah mengikuti diklat, umumnya mereka dapat melaksanakan tugas secara *learning by doing* (belajar sambil bekerja). Apabila mereka mengalami kesulitan, mereka mengadakan koordinasi dengan dinas teknis, sehingga pekerjaan dapat berjalan.

Untuk keberhasilan Dinas Pengelolan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup termasuk pertambangan. Dari sumber daya yang tersedia dalam organisasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sumber daya manusia memegang peranan yang sentral dan paling menentukan. Tanpa sumber daya manusia yang handal, pengolahan, penggunan dan pemanfaatan sumber-sumber lainya akan menjadi tidak efektif, efisien dan produktif. Dalam keadaan yang demikian tidaklah mengherankan bahwa tujuan serta program organisasi yang telah ditetapkan dengan baik akan tetap sulit terwujud secara baik dan benar.

3. Finansial.

Sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, bahwa finansial merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik.

Adanya Finansial, dalam suatu organisasi, selain faktor SDM dan sarana fisik lainya, dukungan anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi. Tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi dan program sebaik apapun harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai.

Finansial di dalam penelitian ini akan dilihat dari tingkat pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan tingkat ketersediaan anggaran biaya operasional untuk kegiatan pembinaan terhadap pegawai dan masyarakat, yang akan diuraikan secara berurutan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, bahwa finansial atau anggaran yang menunjang pelaksanaan tugas di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sejak dibentuk terdiri dari dua mata anggaran yaitu anggaran rutin dan pembangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dan berdasarkan data yang ada, anggaran yang dialokasikan dari APBK Kabupaten Aceh Tengah untuk Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2016 anggaran rutin sebesar Rp. 569.933.110,00 yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar 76,95 %, belanja barang 14,04 %, biaya pemeliharaan 2,98 %, belanja perjalanan dinas 5,04 %, dan biaya lain-lain untuk kesejahtraan pegawai 0,88 %. Sedangkan untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp.683.737.608,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 71,83 %, belanja barang 12,39%, biaya pemeliharaan 5,99 %, belanja perjalanan dinas 4,81 % dan belanja lain-lain untuk biaya operasional dan kesejahtraan pegawai 4,97 %.

Dari jumlah anggaran tahun 2016, yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok sebesar Rp. 131.000.000 yang diperuntukan bagi belanja barang, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas dan kesejahtraan pegawai. Sedangkan pada tahun anggaran 2017 ada kebijakan Bupati Aceh Tengah yang mengalokasikan biaya operasional sebesar Rp. 30.000.000,-.

Apahila dilihat dari pengalokasian anggaran yang dapat langsung mempengaruhi kenerja organisasi diantaranya adanya biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pemantauan dan monitoring ke berbagai kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup termasuk pertambangan. Dari anggaran tersebut biasanya diberikan kepada para pegawai yang melaksanakan kegiatan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas. Setelah melaksanakan tugas para pegawai diharuskan melaporkan secara tertulis basil pemantauan atau monitoring yang dituangkan dalam berita acara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan hasil wawancara dengan para kepala seksi dan para kepala sub bagian, selama tahun 2016 mereka mengeluh karena tidak adanya biaya operasional untuk melakukan kegiatan ke lapangan, sebagaimana pendapat salah seorang kepala seksi:

"untuk melaksanakan pemantauan ke lapangan, kami sering terbentur oleh biaya, disatu sisi kami harus melaksanakan tugas yaitu melaksanakan pemantauan ke perusahaan-perusahaan penambangan, industri maupun ke lokasi lahan tambang yang jaraknya relatif jauh, tetapi disisi lain kami tidak diberi biaya operasional, adapun biaya perjalanan dinas diberikan apabila ada surat tugas dari kepala dinas. Untuk tahun 2002 alhamdulilah ada kebijakan dari Bupati yang memberikan biaya operasional, dengan biaya itu maka kepala dinas memberikan kebijakan lagi dari dana Rp. 30.000.000,00 untuk satu tahun dibagi 12 bulan, dan tiap bulannya hanya 2.500.000,00 dibagi 30 pegawai termasuk kepala dinas, dapat dibayangkan berapa yang kami terima untuk melaksanakan kegiatan. Jadi menurut kami mengenai anggaran ini sangat berpengaruh sekali dalam menunjang kegiatan dinas".

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa faktor anggaran atau finansial berperan sekali dalam menunjang kegiatan dinas, dengan demikian aspek finansial dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek finansial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi.

Dalam masalah finansial ini berbeda pendapat dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas , yang menyatakan bahwa:

" sebetulnya yang saya rasakan, faktor finansial tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja organisasi, sebab tanpa biaya operasionalpun para pegawai masih dapat melaksanakan tugas, sebab pada tahun 2001 saja dinas kami tidak diberi biaya operasional tetap saja kegiatan dapat berjalan, asal ada kemauan pasti mereka bisa melaksanakan tugas. Tetapi alangkah baiknya kalau ada biaya, tetapi menurut saya tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi, yang kami rasakan adalah kurangnya kendaraan operasonal untuk melaksanakan tugas ke lapangan karena kendaraan yang ada tidak mencukupi".

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pernyataan tersebut jelas, bahwa menurut Kepala Dinas faktor finansial tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, yang berpengaruh adalah kendaraan operasional.

Dari kedua pernyataan tersebut terjadi perbedaan persepsi antara para kepala seksi dan para kepala sub bagain dengan kepala dinas mengenai pengaruh finansial terhadap kinerja organisasi. Untuk itu kami melakukan wawancara dengan seorang Kepala Sub Dinas, yang menyatakan sebagai berikut:

" faktor anggaran atau finansial memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas, sebab tanpa ditunjang oleh anggaran yang cukup, bagaimana kami dapat melaksanakan tugas ke lapangan sementara gaji yang kami terima setiap bulan habis oleh keperluan di rumah, jadi untuk melaksanakan pemantauan atau monitoring atau melakukan kegiatan penyuluhan dan sebagainya perlu didukung oleh anggaran".

Berdasarkan pengamatan dan data yang ada, mengenai anggaran rutin yang ada kurang menunjang terhadap pelaksaan tugas pokok dan fungsi, tetapi kekurangan tersebut dapat dibantu oleh adanya anggaran pembangunan, dimana untuk tahun anggaran 2017 ada kebijakan dari Bupati yang menambah jumlah kegiatan serta menambah besarnya alokasi anggaran pembangunan serta adanya biaya operasional.

Jika dikaitkan dengan volume tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas, diantaranya untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan,dan monitoring terhadap perusahaan, penambang dan perusahaan pemakai ABT, jelas diperlukan sumber daya finansial yang memadai. adanya dukungan anggaran yang cukup tujuan organisasi akan mudah tercapai.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Keterkaitan antara Variabel Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Finansial dengan Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk mengetahui keterkaitan antara variabel struktur organisasi, Sumber Daya Manusia dan Finansial dengan Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimna telah diuraikan dimuka, dapatlah diinterpretasikan bahwa faktor struktur organisasi dapat mempengaruhi terhadap kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Berkenaan dengan hal tersebut dari hasil wawancara dan observasi di dapat bahwa dari variabel struktur organisasi masih mengalami kelemahan, antara lain: struktur yang ada belum menampung seluruh tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh dinas, sebagaimana telah dijelaskan di dalam struktur organisasi tidak nampak adanya sub dinas maupun seksi yang khusus menangani masalah pertambangan maupun energi, selain itu jabatan fungsional yang ada belum terisi. Keadaan tersebut jelas dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Kinerja organisasi dilihat dari indikator akuntabilitas sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa tingkat konsisteusi kebijakan dan kegiatan dinas dengan aspirasi masyarakat, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat serta tingkat upaya rehabilitasi kerusakan SDA dan lingkungan, memperlihatkan bahwa pada umumnya kegiatan-kegiatan tersebut belum mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Apabila kita amati tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas dengan aspirasi masyarakat dihubungkan dengan struktur organisasi Dinas, dengan tidak adanya aparatur yang khusus menangani masalah pertambangan, jelas tidak ada orang yang bertanggungjawab secara langsung terhadap kegiatan tersebut. Hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendelegasian wewenang. Dengan tidak adanya yang bertanggungjawab maka berpengaruh terhadap kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat serta tingkat upaya rehabilitasi kerusakan SDA dan lingkungan.

Begitu pula jika dikaitkan dengan indikator responsibilitas, dengan struktur organisasi tersebut yang belum menampung semua kegiatan, maka berpengaruh terhadap upaya pembinaan terhadap para pengusaha/penambang yang melanggar aturan. Hal tersebut berdampak pada tingkat penerimaan dari pajak pertambangan dan ABT yang menjadi kewenangan dinas.

Keadaan struktur organisasi tersebut, juga berpengaruh terhadap kegiatan yang dilaksanakan dinas dalam pemberian pelayanan perijinan. Walaupun ada seksi yang menangani perizinan, tetapi untuk operasionalisasinya memerlukan penanganan yang cepat an tidak berbelit-belit. Sebagaimana telah disebutkan dimuka, bahwa untuk proses perizinan diperlukan ekplorasi ke lapangan, serta perlu diketahui jumlah kandungan yang ada di lokasi penambangan. Dengan tidak adanya aparatur yang bertanggungjawab menangani masalah tersebut, jelas berdampak pada pelayanan yang diberikan.

Keadaan tersebut, ditambah dengan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengelolaan Liugkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, baik secara kuantitas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maupun kualitas belum memadai. Selain itu apabila melihat latar belakang pendidikan jika dikaitkan dengan tugas yang harus dilaksanakan, dari 30 pegawai di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, tidak ada satu orangpun yang berlatar belakang pendidikan formal dari pertambangan, dan elektro, padahal dinas disamping mengelola lingkungan hidup juga mengelola pertambangan dan energi, sehingga diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan yang bersifat teknis pertambangan, lingkungan hidup termasuk energi.

Keadaan tersebut, jika dikaitkan dengan indikator akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas, berdasarkan data dan hasil pengamatan memperlihatkan bahwa dengan jumlah pegawai yang kurang memadai, serta tidak adanya pegawai yang mempunyai keahlian dalam pertambangan dan energi, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa untuk mengetahui kandungan suatu potensi bahan galian termasuk air tanah di suatu daerah, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian pertambangan dan geologi. Dengan kurangnya sumber daya manusia dikaitkan dengan tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas dengan aspirasi masyarakat, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat serta tingkat upaya rehabilitasi kerusakan SDA dan lingkungan jelas berpengaruh.

Apabila sumber dana (finansial) dikaitkan dengan indikator akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas memperlihatkan bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lingkungan dan pertambangan diperlukan sumber dana. Begitupula untuk melaksanakan reklamasi terhadap lahan bekas tambang diperlukan dana.

Masalah dana sebagai penunjang kegiatan di Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup belum memadai. Hal tersebut terlihat masih adanya keluhan dari para pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan data yang ada, memperlihatkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup masih menghadapi kendala, antara lain struktur organisasi yang belum menampung seluruh tugas yang harus dilaksanakan, ditambah kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas, belum adanya pegawai yang mempunyai keahlian di bidang pertambangan dan energi, serta belum memadainya dana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang dapat terlihat dari masih adanya kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang belum tertanggulangi seperti adanya pencemaran, masih rendahnya penerimaan dari pajak bahan galian golongan c (BGGC) dan air bawah tanah (ABT), adanya praktek penambangan yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, seperti tidak memiliki SIPD, luas areal penambangan lebih besar dari luas yang tertera dalam SIPD, dan tidak melakukan reklamasi, masih banyaknya perusahaan yang tidak mempunyai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) maupun tidak memberikan laporan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43460.pdf

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah memperlihatkan bahwa kinerjanya belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, akuntabilitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat baru sebatas pencapaian target belum sampai pada *outcome*, tingkat rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan belum dapat dilaksanakan. *Kedua*, responsibilitas yang memperlihatkan bahwa masih tingginya tingkat pelanggaran pengusaha termasuk penambang terhadap aturan, masih rendahnya tingkat kontribusi penerimaan dari retribusi persampahan, belum sesuainya antara perumusan misi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan. *Ketiga*, responsivitas memperlihatkan bahwa masih adanya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan perijinan, dan belum optimalnya pembinaan terhadap kegiatan para pengusaha / penambang.
2. Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang dilihat dari tiga indikator tersebut, dipengaruhi variabel internal organisasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pertama, variabel struktur organisasi, yakni struktur organisasi yang ada belum menampung seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga berpengaruh terbadap tingkat pendelegasian wewenang, belum sesuainya penempatan pegawai menurut spesialisasi yang diketahui dengan belum terisinya jabatan fungsional dan tingkat pendelegasian pegawai dalam pelaksanaan tugas yang diketahui dengan tidak adanya sub dinas yang menangani masalah pertambangan dan energi. *Kedua*, variabel sumber daya manusia, yakni kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, tingkat pendidikan pegawai yang belum sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan yang diketahui dari belum adanya pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan dari pertambangan maupun elektro, serta kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki pegawai. *Ketiga*, variabel finansial, yakni angaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi belum memadai dan kecilnya biaya operasional untuk menunjang pencapaian misi dan tujuan organisasi. Ketiga variabel internal organisasi tersebut mempengaruhi kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Tengah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup seyogianya diubah menjadi Dinas Pengelola Lingkungan Hidup,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pertambangan dan Energi, serta memperbaiki managemennya. perlunya dibentuk asosiasi pengusaha / penambang guna memudahkan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh mereka.

2. Perlunya optimalisasi pemungutan retribusi pertambangan dan persampahan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. perlunya merekrut tenaga teknis yang menguasai lingkungan hidup, pertambangan, dan energi untuk ditempatkan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tenaga fungsional, serta perlunya meningkatkan kemampuan aparatur dengan mengikutsertakannya pada diklat teknis fungsional.
3. Perlunya studi lanjut, bimtek atau pelatihan bagi Pegawai di Dinas Lingkungan hidup untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di dinas lingkungan hidup

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA\1`

=

|_WQA

Ancok, Djamaluddin, 2010, *Manajemen Sumber daya manusia* (MAP 532)

Amstrong, Michael, 2008. *Menjadi Manajer yang lebih baik lagi*, Binarupa Aksara, Jakarta

Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, jakarta

Bernadin, H.John & Joyce, E.A. Russell, *Human Resource Management*, Mc Grow-Hill, inc., Singapura, 2003

Bryson, John M, (Penerjemah M. Miftahudin), 2011 *perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus, 2010, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, Yogyakarta.

Effendi, Sofian, 2010, *Materi Kuliah Evaluasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, MAP-UGM, Yogyakarta.

Esman, Milton,J, 2009. *The Element of Institution Building*, Ithaca: Cornell University Press.

Etzioni, Amitai, 2008. *Organisasi-Organisasi Modern*, terjemahan Suryatim, UI Press, Jakarta.

Flippo, Edwin B, 1987. *Manajemen Personalia*, edisi keenam, Erlangga Jakarta.

Gibson, Ivancevich dan Donnely, 1989. *organisasi dan Manajemn*, Erlangga Jakarta.

Goggin, Malcolm L., et al, 2009. *Implementation Theory and Practice : Tward a third generation*, Glenview, Illinois, USA : Foresman and Company.

Handayaningrat, Soewarno, 2008. *Administrasi pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, PT.Gunung Agung, Jakarta.

Hasibuan, Malayu SP, 2004. *manajemen dasar, Pengertian dan Masalah*, CV Haji Masagung, Jakarta.

----------,2006. *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Bandung.

Henry, Nicholas, 2008. *Administrasi Negara, Masalah-masalah Kenegaraan*, Rajawali press, Jakarta.

Higgins, J.M, 2007, *Organization Policy and Strategic Management*. Hinsdale, III, Dryden Press.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jackson, J.H, Morgan,CP, dan Paolillo,J, 2008. *Organization Theory, A Macro Perspective for management*, Prentice-Hall, U.S.A.

Joedono, S.B, 2004, *Administrasi Pembangunan, sebuah pengantar*, Prisma No.4,4.

Jones, Gareth R, 2001, *Organizational Theory*: Text and Cases Addition Wesley Publishing Company, A & M University, Texas.

Kaho, Josef Riwu, 2008. *Prospek Otonomi daerah di Negara RI*, Rajawali Pers.

Keban, T. Yeremias, 2011, *Pengantar Administrasi Publik*, Modul untuk Matrikulasi Administrasi publik, MAP- UGM, Yogyakarta.

....., 2005, *Kinerja Organisasi Publik*, Bahan seminar sehari dalam rangka purna tugas Drs. Sediyono, Fisipol- UGM, Yogyakarta.

....., 2008, *Cara Pengukuran Variabel Penelitian*, UGM Yogyakarta.

Kleden, Ignas, 2007. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta

Mitchell, B. Bruce. Setiawan dan Rahmi, Dwita Hadi, 2010, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Cetakan Pertama

Moeleong, Lexy.J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mardiasmo, 2011. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daearah, oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)*, Batam.

Notoatmodjo, Sockidjo, 2008. *Pengembangan Sumber daya Manusia* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.

Numberi, Freddy, 2010. *Organisasi dan Administrasi Pemerintah*, Bahan Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi dan peningkatan pelyanan Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisip UGM Yogyakarta.

Randall B. Ripley, 2005, *Policy Analysis in Political Science*, Chicago, Nelson.

Salusu, J, 2006. *Mpengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik Non Profit*, Pt. Grasindo, Yogyakarta.

Siagian, Soudang P, 2005, *Analisa serta perumusan Kebijaksanaan don Strategi Organisasi*, Gunung Agung, Jakarta

Simamora, Henry, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, SKPN, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 2005. *Methode Penelitian Survey*, Cetakan II, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia,

Sugiyono, 2002. *Methode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Suradinata, Ermaya, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. Ramadhan Bandung.

Soerjadi, FX, 2003. *Organization and Methods*, PT.Midas Surya Grafindo, Jakarta.

Steers, Richard,M, 2000. *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.

Tholia, Miftah, 2011. *Prilaku Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 2006. "*Pembangunan : Dilema dan Tantangan*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Utomo, Warsito, 2009, *Kumpulan Makalah Otonomi Daerah* yang di sampaikan pada beberapa Seminar, Yogyakarta.

Zainum, Buchari, 2009. *Manajemen dan Motivasi*, Edisi Revisi, , Balai Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Undang-Undang Otonomi Daerah 2014 *(UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2014 dan UU No. 28 Tahun 2014)*, Bandung : Kuraiko Pratama.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Program Pembangunan Nasional Tahun 2004-2008*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2009 tentang *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*

Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 tahun 2000 tentang *Apembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Aceh Tengah*

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Kerja sama Badan Pusat Statistik dan Bappeda, *Aceh Tengah Dalam Angka Tahun 2017.*

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Bappeda, *Renstra Tahun 2017.*

Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang *Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 820/Kep.168.DPLH/2015 tentang *Pelimpahan sebagian wewenang urusan pemerintahan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 503.05/kep.167-DPLH/2015 tentang *PelTim Koordinasi proses Penertiban Surat Ijin / Rekomendasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PANDUAN WAWANCARA
PENELITIAN KINERJA ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH

I. UNTUK APARATUR:

A. Variabel Dependent (Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup) meliputi :

1. Indikator Akuntabilitas
   a. Seberapa jauh Kebijakan dan kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup selama ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lingkungan termasuk pertambangan;
   b. Seberapa jauh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mampu melakukan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap SDA adan Lingkungan
   c. Seberapa jauh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mampu merehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan;
2. Indikator Responsibilitas,
   a. Seberapa jauh tingkat kesadaran pengusaha / penambang untuk mempunyai SIPD
   b. Seberapa jauh tingkat kesadaran pengusaha/penambang untuk membayar pajak atas hasil tambangnya
   c. Seberapa jauh tingkat kesadaran pengusaha/penambang untuk melakukan reklamasi
   d. apakah misi dan tujuan organisasi telah sesuai dengan dinamika perubahan;
   e. kegiatan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan

3. Indikator Responsivitas,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. bagaimana kegiatan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. kegiatan apa yang dilakukan untuk membina kegiatan para pengusaha / penambang;

c. kegiatan apa yang dilakukan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup;

B. Variabel Independent terdiri dari:

1. Struktur organisasi
   a. Bagaimana pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi;
   b. Apakah tugas dan fungsi organisasi telah dibagi habis
   c. Apakah penempatan pegawai telah sesuai dengan spesialisasi pendidikan
   d. Bagaimana prilaku pegawai dalam menjalankan tugas telah sesuai dengan peraturan
   e. Bagaimana kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Sumber daya manusia,
   a. bagaimana sumber daya manusia di Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup dilihat dari kuantitas dan kualitas serta strata pendidikan yang dimiliki cukup memadai atau tidak
   b. apa kemampuan teknis yang dimiliki pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
   c. apakah setiap pegawai memahami visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi
   d. bagaimana mekanisme penempatan pegawai di lingkungan dinas
   e. bagaimana semangat staf dalam menjalankan tugas sehari-hari
3. Finansial,
   a. Bagaimana anggaran yang ada telah cukup memadai untuk pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan;
   b. Apakah pengalokasian anggaran telah menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
   c. Apakah ada biaya operasional untuk membina pegawai dan masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

II. Untuk para pengusaha / penambang

1. apakah hak dan kewajiban sdr sebagai pengusaha / penambang?
2. bagaimanakan cara sdr untuk mendapatkan SIPD / SIPA bawah tanah?
3. bagaimanakah cara sdr membayar pajak ?
4. bagaimanakah cara sdr memberikan laporan atas kemajuan tambang/ laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ?
5. apakah sdr sebagai pengusaha/penambang memperoleh bimbingan / pembinaan dari aparatur pemerintah ?
6. Apa kendala yang dihadapi dalam kegiatan /usaha yang saudara laksanakan ?
7. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Keluarga tercinta, khususnya anak-anakku Kaisar Gavin Akbar Jiriadana (Gavin) dan Navisha Kanaya Jiriadana (Kanya) yang selalu sabar dan penuh pengertian di saat Bunda memiliki begitu banyak keterbatasan waktu berkualitas bersama kalian karena menulis TAPM ini.
6. Orang tua terkasih Rtb. Hendra Bambang.W. Soerjaatmadja, MBA dan drg. Nina Ratna Karaton, Sp.PM, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sejak kecil akan arti penting pendidikan dan upaya meningkatkannya pada setiap kesempatan yang ada.
7. Adik-Adik tercinta Indra Soerjaatmadja dan Erna (Istri), Adit Soerjaatmadja dan Dilla (Istri), serta Bima Soerjaatmadja, atas dukungan dan motivasi yang diberikan, terutama saat penulis sedang merasakan lelah dan hilang semangat.
8. Sahabat yang baik hati Stanny Desiana dan Lian Pertiwi atas kerelaannya memberi waktu yang berkualitas untuk mendengarkan curahan hati penulis selama penulisan TAPM ini, serta bersedia menemani penulis berkegiatan dalam rangka menjaga suasana hati selalu baik selama proses penulisan TAPM.
9. Teman-teman satu angkatan di Program Magister Manajamen UT UPBJJ Jakarta angkatan 2016.2 untuk saling dukung, saliug berbagi infromasi, dan saling menyemangati disaat saat lelah dan jenuh melanda dalam proses menulis TAPM ini.
10. Handai taulan dan rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan curahan kasihnya sehingga selesainya TAPM ini.

Disadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakannya. Namun demikian, penulis berharap kiranya TAPM ini dapat menyemarakkan khazanah ilmu pengetahuan manajemen SDM di masa mendatang.

Jakarta, 29 Juli 2018

Penulis,

Ratu Ayu Primiputri Rakhmania Soerjaatmadja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka